# KOMPILASI

## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IV DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR RI

2023

**KOMPILASI**

**Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IV dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
*All rights reserved*

**PENGARAH:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**PENANGGUNG JAWAB:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**KOORDINATOR:**

Hariyanto, S.H

**Tim penyusun:**

Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.

M. Yusuf Wahyudi, S.H.

Mega Diah Restu Widyoratri, S.H.

# SAMBUTAN KEPALA
# BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi IV dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun kompilasi perubahan pasal/ayat dalam undang-undang bidang Komisi IV yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun penambahan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2023
Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

# KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terkait dengan pelaksanan undang-undang, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR RI dan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan melalui pasal/ayat pada suatu undang-undang. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada perubahan 14 (Empat Belas) undang-undang di bidang Komisi IV DPR RI yang memiliki tugas di bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari 14 (empat belas) undang-undang di bidang Komisi IV DPR RI yang telah diubah, dihapus, dan/atau ditambah pengaturan melalui UU 6/2023 berikut informasi terkait peraturan pelaksananya. Dari 14 undang-undang tersebut, sebanyak 12 undang-undang mengamanatkan peraturan pelaksana dan 2 undang-undang tidak mengamanatkan peraturan pelaksana.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**
NIP.196310011988032001

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI ..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... 1

DAFTAR PERATURAN PELAKSANA..... 2

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ..... 12

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN..... 61

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN ..... 78

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN..... 131

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.... 170

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN ..... 181

G. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI..... 196

H. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA ..... 200

I. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN..... 228

J. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG ..... 278

K. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ..... 322

L. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN..... 380

M. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYAAN IKAN, DAN PETAMBAK GARAM ..... 401

N. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ..... 413

## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| 1. | Pasal 18 angka 2/Pasal 7 ayat (5) UU PWP3K | • Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa<br>• Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara<br>• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores |
| 2. | Pasal 18 Angka 3/Pasal 7C | PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3. | Pasal 18 angka 16/Pasal 19 ayat (2) UU PWP3K | • PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>• PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>• PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 4. | Pasal 18 angka 21/Pasal 22C UU PWP3K | • PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>• PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>• PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 5. | Pasal 18 angka 25/Pasal 51 ayat (2) UU PWP3K | • PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 6. | Pasal 18 angka 28/Pasal 71A UU PWP3K | • PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>• PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 7. | Pasal 19 angka 2/Pasal 32 ayat (5) UU Kelautan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 8. | Pasal 19 angka 4/Pasal 43 ayat (8) UU Kelautan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| 9. | Pasal 19 angka 6/Pasal 47 ayat (5) UU Kelautan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 10. | Pasal 19 angka 7/Pasal 47A ayat (3) UU Kelautan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 11. | Pasal 19 angka 10/Pasal 49A ayat (2) UU Kelautan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 12. | Pasal 27 angka 3/Pasal 20A ayat (2) UU Perikanan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 13. | Pasal 27 angka 4/Pasal 25A ayat (3) UU Perikanan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 14. | Pasal 27 angka 7/Pasal 27A ayat (3) UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 15. | Pasal 27 angka 12/Pasal 32 UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur) |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| | | ● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 16. | Pasal 27 angka 13/Pasal 33 ayat (5) UU Perikanan | ● PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan<br>● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 17. | Pasal 27 angka 14/Pasal 35 ayat (4) UU Perikanan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 18. | Pasal 27 angka 15/Pasal 35A ayat (4) UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 19. | Pasal 27 angka 16/Pasal 36 ayat (4) UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 20. | Pasal 27 angka 18/Pasal 40 UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur) |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| | | ● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 21. | Pasal 27 angka 19/Pasal 41 ayat (5) UU Perikanan | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
| 22. | Pasal 27 angka 22/Pasal 44 ayat (3) UU Perikanan | PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 23. | Pasal 29 angka 1/Pasal 14 ayat (3) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 24. | Pasal 29 angka 5/Pasal 18 ayat (2) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah |
| 25. | Pasal 29 angka 6/Pasal 24 ayat (4) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 26. | Pasal 29 angka 7/Pasal 30 ayat (4) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 27. | Pasal 29 angka 9/Pasal 35 ayat (2) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 28. | Pasal 29 angka 12/Pasal 42 ayat (2) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| | | ● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah |
| 29. | Pasal 29 angka 15/Pasal 47 ayat (3) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah |
| 30. | Pasal 29 angka 20/Pasal 60 ayat (3) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah |
| 31. | Pasal 29 angka 21/Pasal 67 ayat (2) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 32. | Pasal 29 angka 23/Pasal 70 ayat (2) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah |
| 33. | Pasal 29 angka 24/Pasal 74 ayat (3) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 34. | Pasal 29 angka 25/Pasal 75 ayat (2) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 35. | Pasal 29 angka 26/Pasal 93 ayat (6) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 36. | Pasal 29 angka 28/Pasal 96 ayat (3) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 37. | Pasal 29 angka 29/Pasal 97 ayat (3) UU Perkebunan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 38. | Pasal 29 angka 30/Pasal 99 ayat (5) UU Perkebunan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| 39. | Pasal 30 angka 1/Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Varietas Tanaman | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 40. | Pasal 30 angka 3/Pasal 40 ayat (3) UU Perlindungan Varietas Tanaman | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 41. | Pasal 30 angka 4/Pasal 43 ayat (4) UU Perlindungan Varietas Tanaman | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 42. | Pasal 31 angka 1/Pasal 19 ayat (5) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 43. | Pasal 31 angka 2/Pasal 22 ayat (2) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 44. | Pasal 31 angka 3/Pasal 32 ayat (4) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 45. | Pasal 31 angka 7/Pasal 102 ayat (7) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 46. | Pasal 31 angka 8/Pasal 108 ayat (3) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 47. | Pasal 33 angka 1/Pasal 15 ayat (4) UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 48. | Pasal 33 angka 2/Pasal 33 ayat (4) UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 49. | Pasal 33 angka 3/Pasal 35 ayat (5) UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 50. | Pasal 33 angka 4/Pasal 35A ayat (3) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 51. | Pasal 33 angka 8/Pasal 52 ayat (2) UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| | | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 52. | Pasal 33 angka 9/Pasal 54 ayat (4) UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 53. | Pasal 33 angka 10/Pasal 56 ayat (4) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 54. | Pasal 33 angka 11/Pasal 57 ayat (5) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 55. | Pasal 33 angka 13/Pasal 68 UU HORTIKULTURA | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 56. | Pasal 33 angka 14/Pasal 73 ayat (3) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 57. | Pasal 33 angka 15/Pasal 88 ayat (4) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 58. | Pasal 33 angka 20/Pasal 122 ayat (3) UU HORTIKULTURA | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 59. | Pasal 34 Angka 1/Pasal 6 ayat (6) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 60. | Pasal 34 Angka 3/Pasal 15 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 61. | Pasal 34 Angka 4/Pasal 16 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 62. | Pasal 34 Angka 5/Pasal 22 ayat (5) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 63. | Pasal 34 Angka 8/Pasal 36B ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| 64. | Pasal 34 Angka 9/Pasal 36C ayat (5) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 65. | Pasal 34 Angka 11/Pasal 52 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 66. | Pasal 34 Angka 12/Pasal 54 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| 67. | Pasal 34 Angka 13/Pasal 59 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 68. | Pasal 34 Angka 14/Pasal 60 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 69. | Pasal 34 Angka 15/Pasal 62 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 70. | Pasal 34 Angka 16/Pasal 69 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 71. | Pasal 34 Angka 17/Pasal 72 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 72. | Pasal 34 Angka 18/Pasal 85 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan | ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko |
| 73. | Pasal 36 angka 1/Pasal 15 ayat (5) UU Kehutanan | PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan |
| 74. | Pasal 36 angka 2/Pasal 18 ayat (3) UU Kehutanan | PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan |
| 75. | Pasal 36 angka 3/Pasal 19 ayat (2) UU Kehutanan | PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan |
| 76. | Pasal 36 angka 8/Pasal 29B UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 77. | Pasal 36 angka 10/Pasal 31 ayat (2) UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| | | ● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 78. | Pasal 36 angka 12/Pasal 33 ayat (3) UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 79. | Pasal 36 angka 13/Pasal 35 ayat (5) UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 80. | Pasal 36 angka 15/Pasal 48 ayat (6) UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 81. | Pasal 36 angka 20/Pasal 80 ayat (3) UU Kehutanan | ● PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 82. | Pasal 37 angka 7/Pasal 18 ayat (2) UU P3H | PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan |
| 83. | Pasal 37 angka 20/Pasal 110A ayat (3) UU P3H | PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan |
| 84. | Pasal 37 angka 21/Pasal 110B ayat (3) UU P3H | PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan |
| 85. | Pasal 64 angka 6/Pasal 68 ayat (6) UU Pangan | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 86. | Pasal 64 angka 7/Pasal 72 ayat (3) UU Pangan | Belum dibentuk peraturan pelaksana |
| 87. | Pasal 64 angka 9/Pasal 77 ayat (3) UU Pangan | PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 88. | Pasal 64 angka 10/Pasal 81 ayat (2) UU Pangan | Belum dibentuk peraturan pelaksana |

| No. | Pasal | Peraturan Pelaksana |
|---|---|---|
| 89. | Pasal 64 angka 13/Pasal 89A ayat (3) UU Pangan | PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 90. | Pasal 64 angka 14/Pasal 91 ayat (3) UU Pangan | PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. |
| 91. | Pasal 115 angka 2/Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko |
| 92. | Pasal 115 angka 3/Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko |
| 93. | Pasal 115 angka 4/Pasal 38A ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | ● PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko |

## A. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

### Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 40, dan angka 41 diubah, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan satu angka yakni angka 14A, serta angka 17, angka 18, dan angka 18A dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **Pasal 1** |
| 14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. | 14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut. | 14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut Nasional Tertentu. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **Pasal 1** |
| - | 14A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu | 14A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu. |
| 17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. | 17. Dihapus. | 17. Dihapus |
| 18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. | 18. Dihapus. | 18.Dihapus |
| 18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. | 18A. Dihapus. | 18A. Dihapus |
| 40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden | 40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan | 40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **Pasal 1** |
| Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | 41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
| **Catatan:**<br>• Terdapat penambahan Pasal 1 angka 14A<br>• Pasal 1 angka 17 dan 18 pernah diubah melalui UU 1/2014<br>• Pasal 18A ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | |
| (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:<br>a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;<br>b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;<br>c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang | (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:<br>a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K;<br>b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan | (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:<br>a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K;<br>b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | |
| selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan<br>d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.<br>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.<br>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.<br>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil tertentu dalam wilayahnya. | c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT.<br>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun<br>(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:<br>a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan | disebut dengan RZ KSN; dan<br>c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT.<br>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun<br>(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 7 | PASAL 7 | |
| | perundang-undangan;<br>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;<br>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan<br>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.<br>(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan **Peraturan Presiden.**<br>(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat. | a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;<br>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;<br>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan<br>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.<br>(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan **Peraturan Presiden.**<br>(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat. |
| Catatan:<br>● Telah Diundangkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa<br>● Telah Diundangkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara<br>● Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores | | |

**3. Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** |
| - | **Pasal 7A**<br>(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.<br>(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.<br>(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut.<br>(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.<br>(5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat | **Pasal 7A**<br>(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.<br>(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.<br>(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut.<br>(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.<br>(5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** |
| | peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.<br><br>**Pasal 7B**<br>Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:<br>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;<br>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan<br>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.<br><br>**Pasal 7C** | dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.<br><br>**Pasal 7B**<br>Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:<br>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;<br>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan<br>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** |
| | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.<br><br>**Pasal 7C**<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan | | |

**4. Pasal 8 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 8** | **PASAL 8** | **PASAL 8** |
| (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.<br>(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<br>(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali. | Dihapus | Dihapus |

**5. Pasal 9 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 9** | **PASAL 9** | **PASAL 9** |
| (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.<br>(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.<br>(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:<br>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;<br>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan<br>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.<br>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 9 | PASAL 9 | PASAL 9 |
| puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.<br>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. | | |

**6. Pasal 10 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 10 | PASAL 10 | PASAL 10 |
| RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:<br>a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;<br>b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;<br>c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan<br>d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan | Dihapus | Dihapus |

**7. Pasal 11 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 11 | PASAL 11 | PASAL 11 |
| (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:<br>a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 11** | **PASAL 11** | **PASAL 11** |
| Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;<br>b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.<br>(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | |

**8. Pasal 12 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 12** | **PASAL 12** | **PASAL 12** |
| (1) RPWP-3-K berisi:<br>a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;<br>b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 12 | PASAL 12 | PASAL 12 |
| pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;<br>d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta<br>e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.<br>(2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali. | | |

**9. Pasal 13 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 13 | PASAL 13 | PASAL 13 |
| (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.<br>(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. | Dihapus | Dihapus |

**10. Pasal 14 dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 14 | PASAL 14 | PASAL 14 |
| (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.<br>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.<br>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.<br>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.<br>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.<br>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.<br>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif. | | |
| **Catatan:**<br>Pasal 14 ayat (1) dan ayat (7) pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.<br>(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan | (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. | (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. |
| **Catatan:**<br>Pasal 16 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 16A** | **PASAL 16A** |
| - | Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif. | Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif. |

**13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 17** | **PASAL 17** | **PASAL 17** |
| (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.<br>(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.<br>(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. | (1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.<br>(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi. | (1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.<br>(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi. |
| **Catatan:**<br>Pasal 17 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**14. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 17A** | **PASAL 17A** |
| - | (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.<br>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.<br>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan | (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.<br>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.<br>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 17A** | **PASAL 17A** |
| | lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. | perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

**15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi. | Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diterbitkan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusahanya. | Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diterbitkan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusahanya. |
| **Catatan:**<br>Pasal 18 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**16. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:<br>a. produksi garam;<br>b. biofarmakologi laut;<br>c. bioteknologi laut;<br>d. pemanfaatan air laut selain energi;<br>e. wisata bahari;<br>f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau<br>g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.<br>(2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:<br>a. produksi garam;<br>b. biofarmakologi laut;<br>c. bioteknologi laut;<br>d. pemanfaatan air laut selain energi;<br>e. wisata bahari;<br>f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau<br>g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.<br>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:<br>a. produksi garam;<br>b. biofarmakologi laut;<br>c. bioteknologi laut;<br>d. pemanfaatan air laut selain energi;<br>e. wisata bahari;<br>f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau<br>g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.<br>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Pasal 19 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| • Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>• Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>• Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**17. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 20** | **PASAL 20** | **PASAL 20** |
| (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.<br>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. | (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.<br>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari | (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.<br>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari |

**18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud | (1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum | (1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Catatan:**<br>Pasal 22 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**19. Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22A** | **PASAL 22A** | **PASAL 22A** |
| Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:<br>a. orang perseorangan warga negara Indonesia;<br>b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau<br>c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat. | (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:<br>a. orang perseorangan warga negara Indonesia;<br>b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;<br>c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau<br>d. Masyarakat Lokal.<br>(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut. | (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:<br>a. orang perseorangan warga negara Indonesia;<br>b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;<br>c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau<br>d. Masyarakat Lokal.<br>(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut. |
| **Catatan:** | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22A** | **PASAL 22A** | **PASAL 22A** |
| Pasal 22A ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**20. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22B** | **PASAL 22B** | **PASAL 22B** |
| Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional. | Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. | Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. |
| **Catatan:**<br>Pasal 22B ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**21. Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22C** | **PASAL 22C** | **PASAL 22C** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Pasal 22C ditambahkan melalui UU 1/2014<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**22. Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26A** | **PASAL 26A** | **PASAL 26A** |
| (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.<br>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.<br>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.<br>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<br>a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;<br>b. menjamin akses publik;<br>c. tidak berpenduduk;<br>d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;<br>e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;<br>f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;<br>g. melakukan alih teknologi; dan<br>h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. | Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. | Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26A** | **PASAL 26A** | **PASAL 26A** |
| (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden. | | |
| **Catatan:**<br>Pasal 26A ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**23. Di antara Pasal 26A dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26B yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 26B** | **PASAL 26B** |
| - | Setiap Orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif. | Setiap Orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif. |

**24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional | Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir. | Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.<br>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.<br>(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. | | |
| **Catatan:**<br>Pasal 50 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**25. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 51** | **PASAL 51** | **PASAL 51** |
| (1) Menteri berwenang:<br>a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap | (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur | (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 51** | **PASAL 51** | **PASAL 51** |
| perubahan lingkungan; dan<br>b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.<br>(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. | dalam **Peraturan Pemerintah.** | dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Pasal 51 pernah diubah melalui UU 1/2014<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan | | |

**26. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:<br>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;<br>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;<br>c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;<br>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku | (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:<br>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;<br>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;<br>c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; | (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:<br>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;<br>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;<br>c. mengusulkan wilayah kelola |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 60 | PASAL 60 | PASAL 60 |
| dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;<br>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;<br>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; | d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;<br>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau- | Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;<br>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| k. memperoleh ganti rugi; dan<br>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:<br>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau<br>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. | Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;<br>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;<br>k. memperoleh ganti rugi; dan<br>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib:<br>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan | jangka waktu tertentu;<br>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;<br>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;<br>k. memperoleh ganti rugi; dan<br>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib:<br>f. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| | lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau<br>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. | Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>g. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>h. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>i. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau<br>j. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. |
| **Catatan:**<br>Pasal 60 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**27. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 71** | **PASAL 71** | **PASAL 71** |
| (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud | Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam | Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 71** | **PASAL 71** | **PASAL 71** |
| dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.<br>(3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan izin;<br>e. pembatalan izin; dan/atau<br>f. denda administratif.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif. | dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |
| **Catatan:**<br>Pasal 60 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**28. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 71A** | **PASAL 71A** |
| - | (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha;<br>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau<br>f. denda administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha;<br>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau<br>f. denda administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>• Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**29. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 73A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 73A** | **PASAL 73A** |
| | Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). | Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). |

**30. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75** | **PASAL 75** | **PASAL 75** |
| Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 75 pernah diubah melalui UU 1/2014 | | |

**31. Pasal 75A dihapus.**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75A** | **PASAL 75A** | **PASAL 75A** |
| Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). | Dihapus | Dihapus |
| **Catatan:**<br>Pasal 75A ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**32. Ketentuan Pasal 78A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78A** | **PASAL 78A** | **PASAL 78A** |
| Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri. | Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. | Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. |
| **Catatan:**<br>Pasal 78A ditambahkan melalui UU 1/2014 | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Angka 1**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas |

**Angka 2**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Cukup Jelas | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultansi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultansi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |

**Angka 3**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** | **PASAL 7A, PASAL 7B, DAN PASAL 7C** |
| - | Pasal 7A<br>Cukup jelas.<br>Pasal 7B<br>Cukup jelas.<br>Pasal 7C<br>Cukup jelas. | Pasal 7A<br>Cukup jelas.<br>Pasal 7B<br>Cukup jelas.<br>Pasal 7C<br>Cukup jelas. |

**Angka 4**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 8** | **PASAL 8** | **PASAL 8** |
| Ayat (1)<br>RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, konflik | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 8** | **PASAL 8** | **PASAL 8** |
| pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum guna mencapai tujuan yang ditetapkan.<br>Ayat (2)<br>Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional, Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 5**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 9** | **PASAL 9** | **PASAL 9** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<br>Ayat (3) | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 9** | **PASAL 9** | **PASAL 9** |
| Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Jangka waktu berlakunya RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<br>Ayat (5)<br>RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi sejalan dengan Pasal 23 ayat (3), dan RSWP-3-K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | | |

**Angka 6**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 10** | **PASAL 10** | **PASAL 10** |
| RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 10** | **PASAL 10** | **PASAL 10** |
| hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<br>Huruf a<br>Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.<br>Kawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 10** | **PASAL 10** | **PASAL 10** |
| pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.<br>Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman.<br>Huruf d<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 7**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 11** | **PASAL 11** | **PASAL 11** |
| Ayat (1)<br>RZWP-3-K kabupaten/kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap- | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 11 | PASAL 11 | PASAL 11 |
| tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 8**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 12 | PASAL 12 | PASAL 12 |
| Ayat (1)<br>Huruf a<br>Penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penggunaan sumber daya yang dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi merusak Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<br>Huruf b<br>Karakteristik Wilayah Pesisir merupakan daerah yang memiliki produktivitas hayati dan intensitas pembangunan yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang dinamis. Pulau- | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 12** | **PASAL 12** | **PASAL 12** |
| Pulau Kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi dengan karakteristik sebagai berikut :<br>a. terpisah dari pulau besar;<br>b. sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan/atau disebabkan manusia;<br>c. memiliki keterbatasan daya dukung pulau;<br>d. apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas;<br>e. ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen.<br>Huruf c<br>Hasil-hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam dokumen konsultasi publik.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas. | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 12** | **PASAL 12** | **PASAL 12** |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 9**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 13** | **PASAL 13** | **PASAL 13** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

**Angka 10**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang | Dihapus | Dihapus |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| diterima dari pihak penanggap.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Dalam hal dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mendapat tanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dokumen tersebut dianggap final. | | |

**Angka 11**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 12**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 16A** | **PASAL 16A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 13**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 17** | **PASAL 17** | **PASAL 17** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<br>Ayat (3) | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 17** | **PASAL 17** | **PASAL 17** |
| Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.<br>Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi. | | |

**Angka 14**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 17A** | **PASAL 17A** |
| - | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

**Angka 15**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 19** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 16**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 17**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 20** | **PASAL 20** | **PASAL 20** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |

**Angka 18**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22A** | **PASAL 22A** | **PASAL 22A** |
| Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. |

**Angka 19**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22B** | **PASAL 22B** | **PASAL 22B** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 20**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22C** | **PASAL 22C** | **PASAL 22C** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 21**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26A** | **PASAL 26A** | **PASAL 26A** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "akses publik" adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara lain:<br>a. akses Masyarakat memanfaatkan sempadan pantai dalam menghadapi Bencana Pesisir;<br>b. akses Masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;<br>c. akses nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih; | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 26A | PASAL 26A | PASAL 26A |
| d. akses pelayaran rakyat; dan<br>e. akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Peserta Indonesia, antara lain, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta badan usaha swasta nasional.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil. | | |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26A** | **PASAL 26A** | **PASAL 26A** |
| Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) Masyarakat di pulau-pulau kecil.<br>Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan bisnis/investasi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat di pulau-pulau kecil.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 22**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 26B** | **PASAL 26B** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 23**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi nasional" adalah Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 24**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 51** | **PASAL 51** | **PASAL 51** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 25**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "wilayah penangkapan ikan secara tradisional" adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan “wilayah penangkapan ikan secara tradisional” adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan “wilayah penangkapan ikan secara tradisional” adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |

**Angka 26**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 71** | **PASAL 71** | **PASAL 71** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 27**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 71A** | **PASAL 71A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 28**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 73A** | **PASAL 73A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 29**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75** | **PASAL 75** | **PASAL 75** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 30**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75A** | **PASAL 75A** | **PASAL 75A** |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

**Angka 31**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78A** | **PASAL 78A** | **PASAL 78A** |
| Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain: | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78A** | **PASAL 78A** | **PASAL 78A** |
| a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;<br>b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;<br>c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;<br>d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;<br>e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;<br>f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan<br>g. Taman Nasional Kepulauan Togean. | | |

**Angka 32**

| UU PWP3K | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## B. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

### Pasal 19

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[1] |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| 9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut. | 9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. | 9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. |
| 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan . pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |

[1] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 19 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020
Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023 yakni perbedaan penulisan seperti yang terdapat pada angka 8, yang memuat perubahan Pasal 48, perbedaan rujukan ayat seperti yang terdapat pada angka 9 yang memuat perubahan Pasal 49 dan perubahan penjelasan seperti yang terdapat dalam penjelasan angka 4 yang memuat perubahan Pasal 43

**2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur laut kepulauan Indonesia.<br>(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.<br>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yangtelah ditentukan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.<br>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.<br>(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.<br>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.<br>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur Laut Kepulauan Indonesia.<br>(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.<br>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.<br>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:** | | |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 32 | PASAL 32 | PASAL 32 |
| Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan | | |

**3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 42 | PASAL 42 | PASAL 42 |
| (1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:<br>a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;<br>b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan<br>c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.<br>(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.<br>(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan. | (1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:<br>a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;<br>b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan<br>c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.<br>(2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.<br>(3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan | (1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:<br>a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;<br>b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan<br>c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan Jasa.<br>(2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.<br>(3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan mempertimbangkan |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 42 | PASAL 42 | PASAL 42 |
| | mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan. | potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan. |

**4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 43 | PASAL 43 | PASAL 43 |
| (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:<br>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;<br>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan<br>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.<br>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.<br>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi | (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:<br>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;<br>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan<br>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.<br>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.<br>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi. | (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:<br>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;<br>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan<br>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.<br>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.<br>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi. |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| kawasan strategis nasionai tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | (4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.<br>(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.<br>(6) Dalam hal perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.<br>(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.<br>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana | (4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.<br>(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.<br>(6) Dalam hal perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata rurang wilayah nasional.<br>(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.<br>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| | dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan | | |

**5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43A** | **PASAL 43A** | **PASAL 43A** |
| - | (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.<br>(2) Penyusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:<br>a. rencana tata ruang Laut;<br>b. rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan<br>c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut | (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.<br>(2) Perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:<br>a. rencana tata ruang Laut;<br>b. rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan<br>c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang Laut sebagaimana dimaksud |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 43A | PASAL 43A | PASAL 43A |
| | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(4) Rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksucd pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain | pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(4) Rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<br>(5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 43A | PASAL 43A | PASAL 43A |
| | dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. | tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. |

**6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 47 | PASAL 47 | PASAL 47 |
| (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wiiayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.<br>(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan izin;<br>e. pembatalan bin; dan/atau<br>f. denda administratif.<br>**(4)** Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut.<br>(2) Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<br>(3) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.<br>(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di | (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan ' wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<br>(3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang diberikan, dikenai sanksi administratif.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| | Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatd cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 47A** | **PASAL 47A** |
| - | (1) Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.<br>(2) Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:<br>a. biofarmakologi laut;<br>b. bioteknologi laut;<br>c. pemanfaatan air laut selain energi;<br>d. wisata bahari;<br>e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;<br>f. telekomunikasi;<br>g. instalasi ketenagalistrikan; | (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberlkan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.<br>(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:<br>a. biofarmakologi Laut;<br>b. bioteknologi Laut;<br>c. pemanfaatan air Laut selain energi;<br>d. wisata bahari;<br>e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;<br>f. telekomunikasi;<br>g. instalasi ketenagalistrikan; |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 47A** | **PASAL 47A** |
| | h. perikanan;<br>i. perhubungan;<br>j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;<br>k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;<br>l. pengumpulan data dan penelitian;<br>m. pertahanan dan keamanan;<br>n. penyediaan sumber daya air;<br>o. pulau buatan;<br>p. dumping;<br>q. mitigasi bencana; dan<br>r. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | h. perikanan;<br>i. perhubungan;<br>j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;<br>k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;<br>l. pengumpulan data dan penelitian;<br>m. pertahanan dan keamanan;<br>n. penyediaan sumber daya air;<br>o. Pulau buatan;<br>p. dumping;<br>q. mitigasi bencana; dan<br>r. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

**9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). | Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif. | Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |

**10. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebagai berikut:**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49A DAN PASAL 49B** | **PASAL 49A DAN PASAL 49B** | **PASAL 49A DAN PASAL 49B** |
| - | Pasal 49A<br>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha;<br>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>f. denda administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**<br><br>Pasal 49B | Pasal 49A<br>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penutupan lokasi;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha;<br>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>f. denda administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.<br><br>Pasal 49B<br>Setiap orang yang melakukan |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49A DAN PASAL 49B** | **PASAL 49A DAN PASAL 49B** | **PASAL 49A DAN PASAL 49B** |
| | Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). | pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Angka 1**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 2**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "bangunan dan instalasi di Laut" adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan, antara lain konstruksi reklamasi, prasarana | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| pariwisata Kelautan, dan prasarana perhubungan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir, Laut, dan pulau-pulau kecil,, antara lain pelindungan terhadap erosi pantai dan pelindungan terhadap ekosistem pesisir dan Laut.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 3**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 42** | **PASAL 42** | **PASAL 42** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 4**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| Ayat (1)<br>Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang | Ayat (1)<br>Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung | Ayat (1)<br>Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang [,aut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur Laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.<br>Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan, untuk melindungi kelestarian Sumber Daya Kelautan, serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.<br>Huruf a<br>Perencanaan tata ruang Laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang | kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.<br>Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.<br>Huruf a<br>Perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3) | kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur Laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.<br>Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian Sumber Daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.<br>Huruf a<br>Perencanaan tata ruang Laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.<br>Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.<br>Yang dimaksud dengan 'kawasan antarwilayah,, antara lain meliputi:<br>a. teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih;<br>b. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata; dan<br>c. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.<br>Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.<br>Yang dimaksud dengan “kawasan antarwilayah” antara lain meliputi:<br>a. teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih;<br>b. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata; dan<br>c. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (8)<br>Cukup jelas. | Ayat (4)<br>Rencana zonasi kawasan strategis nasional merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.<br>Yang dimaksud dengan "kawasan antarwilayah" antara lain:<br>a. teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih;<br>b. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata; dan<br>c. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (8)<br>Cukup jelas. |

**Angka 5**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 43A** | **PASAL 43A** |
| - | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Perencanaan ruang Laut menggunakan sifat komplementer antar hasil perencanaan ruang. Apabila dalam dokumen perencanaan ruang yang lebih rinci tidak terdapat alokasi ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemanfaatan ruang laut, maka menggunakan rencana tata ruang atau rencana zonasi Kawasan Antarwilayah. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Perencanaan ruang Laut menggunakan sifat komplementer antarhasil perencanaan nrang. Jika dalam dokumen perencanaan ruang yang lebih rinci tidak terdapat alokasi ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemanfaatan ruang Laut maka menggunakan rencana tata ruang atau rencana zonasi kawasan antarwilayah. |

**Angka 6**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "izin lokasi" meliputi izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan Laut yang mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| Ayat (4)<br>Cukup jelas | | |

**Angka 7**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 47A** | **PASAL 47A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 8**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 9**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 10**

| UU KELAUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 49A dan PASAL 49B** | **PASAL 49A dan PASAL 49B** |
| - | Pasal 49A<br>Cukup jelas.<br>Pasal 49B<br>Cukup jelas. | Pasal 49A<br>Cukup jelas.<br>Pasal 49B<br>Cukup jelas. |

## C. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

### Pasal 27

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[2] |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1[3]** | **Pasal 1** |
| 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) g*ross ton* (GT). | 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. | 11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan , Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. |
| 16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan | 16. Dihapus. | 16. Dihapus. |

[2] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 19 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020
Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023 yakni perubahan pengaturan seperti yang ada dalam angka 2 yang mengubah penangaturan dalam Pasal 7, dan perbedaan penulisan seperti yang terdapat pada angka 1, yang memuat perubahan Pasal 1 angka 24.
[3] Perubahan Pasal 1 dalam UU 11/2020 mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18 dihapus .

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[2] |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1[3]** | **Pasal 1** |
| untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. | | |
| 17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. | 17. Dihapus. | 17. Dihapus. |
| 18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. | 18. Dihapus. | 18. Dihapus. |
| 24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan. | 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. | 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan. |
| 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. | 25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. | 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah | 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[2] |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1[3]** | **Pasal 1** |
| | yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
| **Catatan:**<br>Pasal 1 angka 11 dan angka 24 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:<br>rencana pengelolaan perikanan;<br>a. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>b. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>c. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>d. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>e. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;<br>f. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; | (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:<br>a. rencana pengelolaan perikanan;<br>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;<br>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; | (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:<br>a. rencana Pengelolaan Perikanan;<br>b. potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;<br>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;<br>d. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;<br>e. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;<br>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan; |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| g. daerah, jalur, dan waktu atau musim<br>h. penangkapan ikan;<br>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;<br>j. pelabuhan perikanan;<br>k. sistem pemantauan kapal perikanan;<br>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;<br>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;<br>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;<br>r. kawasan konservasi perairan;<br>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;<br>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan<br>u. jenis ikan yang dilindungi.<br>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan | g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;<br>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;<br>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;<br>j. pelabuhan perikanan;<br>k. sistem pemantauan kapal perikanan;<br>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;<br>n. pembudidayaan ikan dan pelindungannya;<br>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;<br>r. kawasan konservasi perairan;<br>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;<br>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan | g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan lkan;<br>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;<br>i. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan lkan;<br>j. PelabuhanPerikanan;<br>k. sistem pemantauan Kapal Perikanan;<br>l. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>m. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;<br>n. Pembudidayaan Ikan dan pelindungannya;<br>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;<br>p. rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;<br>q. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;<br>r. kawasan konservasi perairan;<br>s. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;<br>t. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:<br>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;<br>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;<br>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim<br>d. penangkapan ikan;<br>e. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;<br>f. sistem pemantauan kapal perikanan;<br>g. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>h. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;<br>i. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;<br>j. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br>k. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;<br>l. kawasan konservasi perairan;<br>m. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;<br>n. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan | dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan<br>u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.<br>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:<br>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;<br>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;<br>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;<br>d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;<br>e. sistem pemantauan kapal perikanan;<br>f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;<br>h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; | dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan<br>u. jenis Ikan dan genetik Ikan yang dilindungi.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:<br>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;<br>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;<br>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;<br>d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;<br>e. sistem pemantauan Kapal Perikanan;<br>f. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;<br>g. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan lkan berbasis budi daya;<br>h. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya; |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| o. jenis ikan yang dilindungi.<br>(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.<br>(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.<br>(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.<br>(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. | i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;<br>j. kawasan konservasi perairan;<br>k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;<br>l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan<br>m. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.<br>(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.<br>(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. | i. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;<br>j. kawasan konservasi perairan;<br>k. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;<br>l. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan<br>m. jenis Ikan dan genetik Ikan yang dilindungi.<br>(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil. |
| **Catatan:**<br>Pasal 7 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 20A** | **PASAL 20A** | **PASAL 20A** |
| - | (1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan | | |

**4. Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 25A** | **PASAL 25A** | **PASAL 25A** |
| (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.<br>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. | (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil | (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi standar mutu hasil Perikanan.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 25A** | **PASAL 25A** | **PASAL 25A** |
| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam **Peraturan Menteri.** | perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | memenuhi standar mutu hasil Perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar , mutu hasil Perikanan diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Pasal 25A ditambahkan melalui UU 45/2009<br>• Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan | | |

**5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26** | **PASAL 26** | **PASAL 26** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:<br>a. penangkapan Ikan;<br>b. pembudidayaan Ikan;<br>c. pengangkutan Ikan;<br>d. pengolahan Ikan; dan<br>e. pemasaran Ikan. | (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:<br>a. Penangkapan Ikan;<br>b. Pembudidayaan lkan;<br>c. pengangkutan Ikan;<br>d. pengolahan Ikan; dan<br>e. pemasaran Ikan. |

**6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27** | **PASAL 27** | **PASAL 27** |
| (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.<br>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.<br>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.<br>(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli | (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan | (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau Laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 27 | PASAL 27 | PASAL 27 |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil. | berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.<br>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<br>(5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil. | berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.<br>(4) Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<br>(5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil. |
| **Catatan:**<br>Pasal 27 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 27A | PASAL 27A | PASAL 27A |
| | (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha | (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau Laut Lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 27A | PASAL 27A | PASAL 27A |
| | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif. | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif. |
| | (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. | (2) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif. |
| | (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. | (3) Setiap Orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif. |
| | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata, cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 27A | PASAL 27A | PASAL 27A |
| | dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 28 | PASAL 28 | PASAL 28 |
| (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.<br>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara | (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan | (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.<br>(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. | Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.<br>(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil. | Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pengangkut Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.<br>(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil. |
| **Catatan:**<br>Pasal 28 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**9. Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28A** | **PASAL 28A** | **PASAL 28A** |
| Setiap orang dilarang:<br>a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau<br>b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. | Setiap orang dilarang:<br>a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;<br>c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau<br>d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain | Setiap Orang dilarang:<br>a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;<br>c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau<br>d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 28A | PASAL 28A | PASAL 28A |
| | dan/atau kapal milik sendiri. | kapal lain dan/ atau kapal milik sendiri. |
| **Catatan:**<br>Pasal 28A ditambahkan melalui UU 45/2009 | | |

**10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 30 | PASAL 30 | PASAL 30 |
| (1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. | (1) Pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. | (1) Pemberian Peizinan Berusaha kepada orang danlatau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian Perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. |
| (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut. | (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut. | (2) Perjanjian Perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian Perikanan tersebut. |
| (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian | (3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang | (3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/ atau badan hukum asing yang |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 30 | PASAL 30 | PASAL 30 |
| perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. | beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. | beroperasi di ZEEI, perjanjian Perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. |

**11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 31 | PASAL 31 | PASAL 31 |
| (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI. | (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. | (1) Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |
| (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI. | (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. | (2) Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |

**12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait usaha Perikanan dan Kapal Perikanan diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Pasal 32 pernah diubah melalui UU 45/2009<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan | (1) Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 33 | PASAL 33 | PASAL 33 |
| | oleh Setiap Orang yang meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kesenangan dan wisata.<br>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang yang menangkap ikan dan/atau membudidayakan ikan untuk kebutuhan sehari-hari.<br>(4) Persetujuan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | oleh Setiap Orang yang meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kesenangan dan wisata.<br>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang yang menangkap Ikan dan/atau membudidayakan Ikan untuk kebutuhan sehari-hari.<br>(4) Persetujuan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan | | |

**14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri**.**<br>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran. | (1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud | (1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| | pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan | | |

**15. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35A** | **PASAL 35A** | **PASAL 35A** |
| (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.<br>(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.<br>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan | (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.<br>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.<br>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 35A | PASAL 35A | PASAL 35A |
| sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. | | |
| **Catatan:**<br>● Pasal 35A ditambahkan melalui UU 45/2009<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 36 | PASAL 36 | PASAL 36 |
| (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.<br>(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:<br>a. bukti kepemilikan;<br>b. identitas pemilik; dan<br>c. surat ukur.<br>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana | (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.<br>(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. | (1) Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.<br>(2) Kapal Perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36** | **PASAL 36** | **PASAL 36** |
| dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.<br>(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. | (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (3) Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas yang tidak mendaftarkan Kapal Perikanannya sebagai Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebggaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Pasal 36 pernah diubah melalui UU 45/2009<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di | (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk | (1) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.<br>(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.<br>(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. | melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.<br>(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.<br>(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. | melakukan Penangkapan Ikan selama berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka.<br>(2) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa' alat Penangkapan Ikan lainnya.<br>(3) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan wajib menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. |

**18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 40** | **PASAL 40** | **PASAL 40** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda | Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran | Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan sebagaimana |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 40** | **PASAL 40** | **PASAL 40** |
| pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan **Peraturan Menteri.** | kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | dimaksud dalam Pasal 35, pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemberian tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, penggunaan alat Penangkapan Ikan oleh kapal penangkap Ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penggunaan 2 (dua) jenis alat Penangkapan Ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, serta pengukuran Kapal Perikanan diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 41** | **PASAL 41** | **PASAL 41** |
| (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.<br>(2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan: | (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.<br>(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan: | (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan. dan melakukan pembinaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.<br>(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan: |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 41** | **PASAL 41** | **PASAL 41** |
| a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;<br>b. klasifikasi pelabuhan perikanan;<br>c. pengelolaan pelabuhan perikanan;<br>d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;<br>e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan<br>f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. | a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;<br>b. klasifikasi pelabuhan perikanan;<br>c. pengelolaan pelabuhan perikanan;<br>d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;<br>e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan<br>f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. | a. rencana induk Pelabuhan Perikanan secara nasional;<br>b. klasifikasi Pelabuhan Perikanan;<br>c. pengelolaan Pelabuhan Perikanan;<br>d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan Pelabuhan Perikanan;<br>e. wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan<br>f. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. |
| (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. | (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. | (3) Setiap kapal penangkap Ikan dan kapa pengangkut Ikan harus mendaratkan Ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. |
| (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan | (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan | (4) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan yang tidak melakukan bongkar muat Ikan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 41** | **PASAL 41** | **PASAL 41** |
| perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Menteri.** | yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Pasal 41 pernah diubah melalui UU 45/2009<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (beberapa ketentuannya terkait perikanan dicabut melalui PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | | |

**20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 42** | **PASAL 42** | **PASAL 42** |
| (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.<br>(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: | (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.<br>(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: | (1) Dalam rangka keselamatan operasional Kapal Perikanan, ditunjuk syahbandar di Pelabuhan Perikanan.<br>(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang: |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 42 | PASAL 42 | PASAL 42 |
| a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;<br>b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;<br>c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;<br>d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;<br>e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;<br>f. memeriksa *log book* penangkapan dan<br>g. pengangkutan ikan;<br>h. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;<br>i. mengawasi pemanduan;<br>j. mengawasi pengisian bahan bakar;<br>k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;<br>l. melaksanakan bantuan pencarian dan<br>m. penyelamatan;<br>n. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; | a. menerbitkan persetujuan berlayar;<br>b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;<br>c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;<br>d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;<br>e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;<br>f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;<br>g. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;<br>h. mengawasi pemanduan;<br>i. mengawasi pengisian bahan bakar;<br>j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;<br>k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;<br>l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;<br>m. mengawasi pelaksanaan | a. menerbitkan persetujuan berlayar;<br>b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;<br>c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;<br>d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;<br>e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;<br>f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan Ikan;<br>g. mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;<br>h. mengawasi pemanduan;<br>i. mengawasi pengisian bahan bakar;<br>j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;<br>k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;<br>l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan; |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 42** | **PASAL 42** | **PASAL 42** |
| o. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;<br>p. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;<br>q. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal<br>r. Perikanan; dan<br>s. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.<br>(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.<br>(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.<br>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di | perlindungan lingkungan maritim;<br>n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;<br>o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan<br>p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.<br>(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.<br>(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.<br>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;<br>n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;<br>o. menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan; dan<br>p. memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.<br>(3) Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan.<br>(4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.<br>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di Pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan setempat.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 42 | PASAL 42 | PASAL 42 |
| pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Catatan:**<br>Pasal 41 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 43 | PASAL 43 | PASAL 43 |
| Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. | Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. | Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan wajib memenuhi standar laik operasi Kapal Perikanan dari pengawas Perikanan tanpa dikenai biaya. |
| **Catatan:**<br>Pasal 43 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 44 | PASAL 44 | PASAL 44 |
| (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.<br>(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan | (1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi.<br>(2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan | (1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayal (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah Kapal Perikanan memenuhi standar laik operasi.<br>(2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas Perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. | kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Pasal 44 pernah diubah melalui UU 45/2009<br>• Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan | | |

**23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 45** | **PASAL 45** | **PASAL 45** |
| Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat. | Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat. | Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/ atau berpangkalan di luar Pelabuhan Perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat. |

**24. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan. | Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenai pungutan perikanan. | Setiap Orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI dikenai pungutan Perikanan. |

**25. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 89** | **PASAL 89** | **PASAL 89** |
| Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam | Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana | Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan lkan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 89** | **PASAL 89** | **PASAL 89** |
| Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). | dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). | dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah). |

**26. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). | Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). | Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

**27. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki | (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas | (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 93 | PASAL 93 | PASAL 93 |
| SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<br>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, | tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelaakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). | dan/atau Laut kpas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan<br>(3) terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 93 | PASAL 93 | PASAL 93 |
| yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). | | (tiga puluh miliar rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 44 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**28. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 94 | PASAL 94 | PASAL 94 |
| Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). | Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). | Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

**29. Ketentuan Pasal 94A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 94A | PASAL 94A | PASAL 94A |
| Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan | Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, | Setiap Orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 94A** | **PASAL 94A** | **PASAL 94A** |
| pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). | menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). | menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 94A ditambahkan melalui UU 45/2009 | | |

**30. Pasal 95 dihapus.**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 95** | **PASAL 95** | **PASAL 95** |
| Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). | Dihapus | Dihapus |

**31. Pasal 96 dihapus.**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia | Dihapus | Dihapus |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 96 | PASAL 96 | PASAL 96 |
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). | | |

**32. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 97 | PASAL 97 | PASAL 97 |
| (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br>(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), | (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br>(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan | (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan selama berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br>(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat Penangkapan Ikan lainnya sebagaimana dimaksud |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 97 | PASAL 97 | PASAL 97 |
| dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br>(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br>(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana denda palingbanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br>(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |

**33. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 98 | PASAL 98 | PASAL 98 |
| Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana | Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) | Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 98** | **PASAL 98** | **PASAL 98** |
| dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). | dipidana dengan pidana pedara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 98 pernah diubah melalui UU 45/2009 | | |

**34. Ketentuan Pasal 100B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100B** | **PASAL 100B** | **PASAL 100B** |
| Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D ditambahkan melalui UU 45/2009 | | |

**35. Ketentuan Pasal 100C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100C** | **PASAL 100C** | **PASAL 100C** |
| Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dilakukan oleh | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dilakukan oleh |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100C** | **PASAL 100C** | **PASAL 100C** |
| Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). | Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). | Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |
| **Catatan:**<br>Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D ditambahkan melalui UU 45/2009 | | |

**36. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan. | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 94A dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan. |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Angka 1**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas |

**Angka 2**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Ayat (1)<br>Huruf a | Ayat (1)<br>Huruf a | Ayat (1)<br>Huruf a |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan kapal perikanan" adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).<br>Huruf l<br>Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang | Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan kapal perikanan" adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system*/VMS).<br>Huruf l<br>Dalam usaha meningkatkan | Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan Kapal Perikanan" adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan Kapal Perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan Kapal Perikanan (*vessel monitoring system*/VMS).<br>Huruf l |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 7 | PASAL 7 | PASAL 7 |
| kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.<br>Huruf m<br>Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan berbasis budi daya" adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.<br>Huruf n<br>Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.<br>Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan | produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.<br>Huruf m<br>Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan berbasis budi daya" adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.<br>Huruf n<br>Cukup jelas.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p<br>Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam | Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran Ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya Ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran Ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian Sumber Daya Ikan.<br>Huruf m<br>Yang dimaksud dengan "Penangkapan Ikan berbasis budi daya" adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.<br>Huruf n<br>Cukup jelas.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 7 | PASAL 7 | PASAL 7 |
| yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p<br>Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.<br>Huruf q<br>Cukup jelas.<br>Huruf r<br>Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan | melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.<br>Huruf q<br>Cukup jelas.<br>Huruf r<br>Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan | Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak Ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya Ikan, atau pengerukan dasar perairan.<br>Huruf q<br>Cukup jelas.<br>Huruf r<br>Cukup jelas<br>Huruf s<br>Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.<br>Huruf s<br>Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.<br>Huruf t<br>Cukup jelas.<br>Huruf u<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Yang dimaksud dengan "para ahli" adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.<br>Ayat (6)<br>Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:<br>a. ikan bersirip (*pisces*);<br>b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*); | sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.<br>Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.<br>Huruf s<br>Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari 1 (satu) wilayah ke wilayah lainnya.<br>Huruf t | bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit Ikan dari 1 (satu) wilayah ke wilayah lainnya.<br>Huruf t<br>Cukup jelas.<br>Huruf u<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);<br>d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);<br>e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);<br>f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);<br>g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan<br>h. sebangsanya (*reptilia*);<br>i. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);<br>j. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan<br>k. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas; semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi | Cukup jelas.<br>Huruf u<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | |

**Angka 3**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 20A** | **PASAL 20A** | **PASAL 20A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 4**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 25A** | **PASAL 25A** | **PASAL 25A** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 5**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26** | **PASAL 26** | **PASAL 26** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 6**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27** | **PASAL 27** | **PASAL 27** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Yang dimaksud dengan "SIPI asli" adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.<br>Yang dimaksud dengan "membawa SIPI asli" adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 7**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27A** | **PASAL 27A** | **PASAL 27A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 8**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Ayat (3)<br>Yang dimaksud dengan "SIKPI asli" adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.<br>Yang dimaksud dengan "membawa SIKPI asli" adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 9**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28A** | **PASAL 28A** | **PASAL 28A** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 10**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 11**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 31** | **PASAL 31** | **PASAL 31** |
| Ayat (1)<br>SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIPI asli dan bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIPI asli.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 12**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 13**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **Pasal 33** |
| Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial" adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 14**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| Ayat (1)<br>Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas | Ayat (1)<br>Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung Sumber Daya Ikan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |

**Angka 15**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35A** | **PASAL 35A** | **PASAL 35A** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 16**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36** | **PASAL 36** | **PASAL 36** |
| Ayat (1)<br>Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai *grosse* akte pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.<br>Ayat (2)<br>Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36** | **PASAL 36** | **PASAL 36** |
| Ayat (4)<br>Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | | |

**Angka 17**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| Ayat (1)<br>Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas | Ayat (1)<br>Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Kewajiban menyimpan alat penangkapan Ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap Kapal Perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

**Angka 18**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 40** | **PASAL 40** | **PASAL 40** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 19**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 41** | **PASAL 41** | **PASAL 41** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 41 | PASAL 41 | PASAL 41 |
| Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.<br>Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui | Klasifikasi Pelabuhan Perikanan termasuk diantaranya Pelabuhan Perikanan samudera, Pelabuhan Perikanan nusantara dan Pelabuhan Perikanan pantai.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional Pelabuhan Perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 41 | PASAL 41 | PASAL 41 |
| | koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan "bongkar muat ikan" adalah termasuk juga pendaratan ikan.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan "bongkar muat Ikan" adalah termasuk juga pendaratan Ikan.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. |

**Angka 20**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 42 | PASAL 42 | PASAL 42 |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "syahbandar di Pelabuhan Perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.<br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f |

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 42** | **PASAL 42** | **PASAL 42** |
| Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas.<br>Huruf n<br>Cukup jelas.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas.<br>Huruf n<br>Cukup jelas.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan ikan.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas.<br>Huruf n<br>Cukup jelas.<br>Huruf o<br>Cukup jelas.<br>Huruf p<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. |

**Angka 21**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 22**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 23**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 45** | **PASAL 45** | **PASAL 45** |
| Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.<br>Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan.<br>Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka Persetujuan Berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat. | Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.<br>Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari pengawas perikanan.<br>Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat. | Kapal Perikanan yang berlayar tidak dari Pelabuhan Perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada Pelabuhan Perikanan.<br>Termasuk Kapal Perikanan yang berlayar tidak dari Pelabuhan Perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari pengawas Perikanan.<br>Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi Kapal Perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat. |

**Angka 24**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 25**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 89** | **PASAL 89** | **PASAL 89** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 26**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 27**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 28**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 94** | **PASAL 94** | **PASAL 94** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 29**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 94A** | **PASAL 94A** | **PASAL 94A** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 30**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 95** | **PASAL 95** | **PASAL 95** |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

**Angka 31**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

**Angka 32**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 97** | **PASAL 97** | **PASAL 97** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 33**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 98** | **PASAL 98** | **PASAL 98** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 34**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100B** | **PASAL 100B** | **PASAL 100B** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 35**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100C** | **PASAL 100C** | **PASAL 100C** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

**Angka 36**

| UU PERIKANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## D. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

### Pasal 29

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| (1) Pemerintah pusat menetapkan batasan luas maksimum luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.<br>(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:<br>a. jenis tanaman;<br>b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;<br>c. modal;<br>d. kapasitas pabrik;<br>e. tingkat kepadatan penduduk;<br>f. pola pengembangan usaha;<br>g. kondisi geografis;<br>h. perkembangan teknologi; dan<br>i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan bidang tata ruang.<br>(3) Ketentuan diatur lebih laniut mengenai penetapan | (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.<br>(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:<br>a. jenis tanaman;<br>b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;<br>c. modal;<br>d. kapasitas pabrik;<br>e. tingkat kepadatan penduduk;<br>f. pola pengembangan usaha;<br>g. kondisi geografis;<br>h. perkembangan teknologi; dan<br>i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan | (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.<br>(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:<br>a. jenis tanaman; dan<br>b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah.** |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| batasan luas dalam peraturan pemerintah. | perundang-undangan di bidang tata ruang<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah.** | |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. | | |

**2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. | Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. | Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. |

**3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:<br>a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan Lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga | (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.<br>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan | (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah.<br>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 16 | PASAL 16 | PASAL 16 |
| puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan<br>b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman perkebunan.<br>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentua.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunar yang belum diusahakan diambrl alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

**4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 17 | PASAL 17 | PASAL 17 |
| (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana | (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha | (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.<br>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 17** | **PASAL 17** | **PASAL 17** |
| dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). | Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). | Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). |

**5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/ atau<br>c. pencabutan Izin Usaha perkebunan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai clar tata cara pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Peraturan pemerintah. jenis, besaran denda, sanksi administratif (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah | (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah | | |

**6. Ketentuan Pasal 24 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 24** | **PASAL 24** | **PASAL 24** |
| (1) Pemerintah pusat menetapkan jenis benih Tanaman perkebunan yang pengeiuarin dari dan/atau pemasukannya Republik ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia memerlukan izin.<br>(2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah ke Negara Kesatuan Repubiik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.<br>(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan.<br>(2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat.<br>(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan.<br>(2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebetum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.<br>(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peruncuran diaiur dengan Peraturan Menteri. | (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.<br>(2) Varietas yang telah dilepas sebagaimana dimaksud pada diproduksi dan diedarkan.<br>(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada sebelum diedarkan harus memenuhi Berusaha dari Pemerintah pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.<br>(2) Varietas yang telah dilepas sebagaimana dimaksud pada diproduksi dan diedarkan.<br>(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**8. Pasal 31 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 31** | **PASAL 31** | **PASAL 31** |
| (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan diproduksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.<br>(2) Varietas diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum harus diiakukan sertifikasi dan diberi label.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengerai produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri. | Dihapus | Dihapus |

**9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggtumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.<br>(2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap pelaku Usaha perkebunan wajib memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.<br>(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.<br>(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. | | |

10. **Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 39** | **PASAL 39** | **PASAL 39** |
| (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.<br>(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. badan hukum asing; atau<br>b. perseorangan warga negara asing<br>(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dlam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia | Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubrik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. | Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubrik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. |

11. **Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 40** | **PASAL 40** | **PASAL 40** |
| (1) Pengalihan kepemilikan Perusahan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.<br>(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. | Pengalihan kepemilikan Perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah pusat. | Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat. |

12. **Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 42** | **Pasal 42** | **Pasal 42** |
| Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan. | (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah | | |

13. **Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya | Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya | Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan. | masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan. | masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas Tanah dan izin Usaha Perkebunan. |

14. **Pasal 45 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 45** | **PASAL 45** | **PASAL 45** |
| (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:<br>a. izin lingkungan;<br>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan<br>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.<br>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):<br>a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan<br>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri. | Dihapus | Dihapus |

15. **Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.<br>(2) izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:<br>a. jenis tanaman;<br>b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;<br>c. teknologi;<br>d. tenaga kerja; dan<br>e. modal. | (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.<br>(2) Setiap Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan;<br>b. pengenaan denda; dan/atau<br>c. paksaan Pemerintah pusat. | (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan;<br>b. pengenaan denda; dan/atau<br>c. paksaan Pemerintah pusat. |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah | | |

16. **Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:<br>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan<br>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.<br>(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.<br>(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin | (1) Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:<br>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan<br>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan | (1) Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:<br>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan<br>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).<br>(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri. | kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).<br>(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat. | kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).<br>(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat. |

17. **Ketentuan Pasal 49 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan | Dihapus | Dihapus |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah. | | |

18. **Pasal 50 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:<br>a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau<br>b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dihapus | Dihapus |

19. **Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 58** | **PASAL 58** | **PASAL 58** |
| (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.<br>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud | (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:<br>a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau<br>b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi | (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:<br>a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau<br>b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 58 | PASAL 58 | PASAL 58 |
| pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. | pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.<br>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.<br>(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah | wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.<br>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.<br>(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 58** | **PASAL 58** | **PASAL 58** |
| | Daerah sesuai dengan kewenangannya. | Daerah sesuai dengan kewenangannya. |

20. **Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau<br>c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) Perusahaan Perkebunan yang meianggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau<br>c. pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.<br>(3) Kentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Perusahaan Perkebunan yang meianggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau<br>c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.<br>(3) Kentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| ● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah | | |

21. **Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 67** | **PASAL 67** | **PASAL 67** |
| (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:<br>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;<br>b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan | (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 67** | **PASAL 67** | **PASAL 67** |
| c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.<br>(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya. | | |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

22. **Pasal 68 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:<br>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;<br>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan<br>c. pemantauan lingkungan hidup. | Dihapus | Dihapus |

23. **Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 70** | **PASAL 70** | **PASAL 70** |
| (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau<br>c. pencabutan izin usaha perkebunan<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah | | |

24. **Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. | (1) Setiap unit Pengolahan Hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah | (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | unit pengolahannya beroperasi.<br>(2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.<br>(3) Ketentuan mengenai jenis pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | unit pengolahannya beroperasi.<br>(2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.<br>(3) Ketentuan mengenai jenis pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

**25. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75** | **PASAL 75** | **PASAL 75** |
| (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri; | (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat | (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75** | **PASAL 75** | **PASAL 75** |
| c. ganti rugi; dan/atau<br>d. pencabutan izin usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

**26. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.<br>(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.<br>(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.<br>(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan | (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.<br>(2) Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.<br>(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha perkebunan, dana | (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.<br>(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.<br>(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 93 | PASAL 93 | PASAL 93 |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.<br>(4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan parrgar, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.<br>(5) Dana yang dihimpun oleh pelaku Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan | lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.<br>(4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan Hasil Perkebunan untuk kebutuhan parrgar, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.<br>(5) Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana Perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| | pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | pengelola dana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

**27. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 95** | **PASAL 95** | **PASAL 95** |
| (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.<br>(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.<br>(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.<br>(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.<br>(5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal | (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Pekebun. | (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Pekebun. |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 95 | PASAL 95 | PASAL 95 |
| asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. | | |

**28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 96 | PASAL 96 | PASAL 96 |
| (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.<br>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. perencanaan;<br>b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;<br>c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;<br>d. penelitian dan pengembangan;<br>e. pengembangan sumber daya manusia;<br>f. pembiayaaan Usaha Perkebunan; dan<br>g. pemberian rekomendasi penanaman modal. | (1) Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. perencanaan;<br>b. pelaksanaan Usaha perkebunan;<br>c. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;<br>d. penelitian dan pengembangan;<br>e. pengembangan sumber daya manusia;<br>f. pembiayaaan Usaha perkebunan; dan<br>g. pemberian rekomendasi penanaman modal<br>(3) Ketentuan lebih tanjut mengenai pembinaan | (1) Pembinaan UsahaPperkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. perencanaan;<br>b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;<br>c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;<br>d. penelitian dan pengembangan;<br>e. pengembangan sumber daya manusia;<br>f. pembiayaaan Usaha Perkebunan; dan<br>g. pemberian rekomendasi penanaman modal |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (3) Ketentuan lebih tanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

29. **Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 97** | **PASAL 97** | **PASAL 97** |
| (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.<br>(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh Pemerintah pusat.<br>(2) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan miiik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha perkebunin diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Pembinaan teknis untuk perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan miiik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

30. **Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 99** | **PASAL 99** | **PASAL 99** |
| (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:<br>a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan ; dan /atau<br>b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksan aan dan hasil Usaha Perkebunan<br>(2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.<br>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dilakukan melalui:<br>a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau<br>b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.<br>(2) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.<br>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oieh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan | (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:<br>a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau<br>b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.<br>(2) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.<br>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oieh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 99** | **PASAL 99** | **PASAL 99** |
| | dan tata cara pengawasan diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | dan tata cara pengawasan diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

31. **Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 103** | **PASAL 103** | **PASAL 103** |
| Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |

32. **Pasal 105 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan | Dihapus | Dihapus |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | | |

33. **Pasal 106 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 106** | **PASAL 106** | **PASAL 106** |
| Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berw enang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:<br>a menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peru ntukan; dan/atau<br>b menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000 .000.000,00 (lima miliar rupiah) . | Dihapus | Dihapus |

34. **Pasal 109 dihapus.**

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 109** | **PASAL 109** | **PASAL 109** |
| Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:<br>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; | Dihapus | Dihapus |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 109** | **PASAL 109** | **PASAL 109** |
| b. analisis risiko lingkungan hidup; dan<br>c. pemantauan lingkungan hidup;<br>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar Lahan Perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecaha yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang diperyaratkan. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 3

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Bidang tanah Perkebunan | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 16 | PASAL 16 | PASAL 16 |
| yang diambil alih oleh negara merupakan bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sedangkan bidang Tanah Perkebunan yang telah diusahakan tetap menjadi milik Perushaan Perekbunan | | |

Angka 4

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 17 | PASAL 17 | PASAL 17 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 5

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 18 | PASAL 18 | PASAL 18 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 6

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 24 | PASAL 24 | PASAL 24 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 7

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 30 | PASAL 30 | PASAL 30 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 8

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 18 | PASAL 18 | PASAL 18 |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

Angka 9

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 35 | PASAL 35 | PASAL 35 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 10

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 39** | **PASAL 39** | **PASAL 39** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 11

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 40** | **PASAL 40** | **PASAL 40** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud "kepentingan nasional" adalah suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 12

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 42** | **PASAL 42** | **PASAL 42** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 13

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 14

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 45** | **PASAL 45** | **PASAL 45** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 15

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 47** | **PASAL 47** | **PASAL 47** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh |

| | | |
|---|---|---|
| skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.<br>Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit Pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 16

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| Ayat (1)<br>Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Laporan perkembangan usaha antara lain perkembangan pelaksanaan perizinan, jumlah produksi, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 48 | PASAL 48 | PASAL 48 |
| pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan hidup | | |

Angka 17

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 49 | PASAL 49 | PASAL 49 |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 18

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 50 | PASAL 50 | PASAL 50 |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 19

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 58 | PASAL 58 | PASAL 58 |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud "total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan" adalah luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% hanya ditujukan kepada pekebun yang mendapatkan lahan untuk perkebunan yang berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas lahan perkebunan yang bersumber dari lahan negara.<br>Dalam hal perolehan lahan perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan hak | Ayat (1)<br>Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) hanya ditujukan kepada Pekebun yang mendapatkan lahan untuk Perkebunan yang berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas Lahan Perkebunan yang bersumber dari lahan negara.<br>Dalam hal perolehan Lahan Perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 58 | PASAL 58 | PASAL 58 |
| | guna usaha, maka pekebun tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitasi.<br>Kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai.<br>Namun pekebun tetap didorong memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan kebunnya.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | yang diberikan hak guna usaha, maka Pekebun tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitasi.<br>Kewajiban fasilitasi Perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan Lahan Perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% (dua puluh persen) lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai.<br>Namun Pekebun tetap didorong memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan kebunnya.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |

Angka 20

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|

| PASAL 60 | PASAL 60 | PASAL 60 |
|---|---|---|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 21

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 67** | **PASAL 67** | **PASAL 67** |
| Ayat (1)<br>Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Huruf a<br>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hiudp. Sedangkan bagi Perusahaan | Ayat (1)<br>Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 67** | **PASAL 67** | **PASAL 67** |
| Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiataannya tidak menimbulkan dambak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemnatuan lingkungan hidup.<br>Huruf b<br>Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan yang memproduksi dan/ata memasarkan benih hasil rekayaya genetika agar memenuhi kaidah-kaidah kemanan hayati dan keamanan pangan atau pakan. | | |

Angka 22

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 23

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 70** | **PASAL 70** | **PASAL 70** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 24

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| Ayat (1)<br>Hasil Perkebunan tertentu yang | Ayat (1)<br>Hasil Perkebunan tertentu | Ayat (1)<br>Hasil Perkebunan tertentu |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| berbahan baku impor antara lain gula tebu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 25

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 75** | **PASAL 75** | **PASAL 75** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 26

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 27

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 95** | **PASAL 95** | **PASAL 95** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 28

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 29

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 97** | **PASAL 97** | **PASAL 97** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah penerapan budi daya yang bark *(good agricultural practices)*, penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik *(good handling practices)* dan *good manufactuing practices*, dan penerapan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah penerapan budi daya yang bark *(good agricultural practices)*, penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik *(good handling* | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah penerapan budi daya yang bark *(good agricultural practices)*, penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik *(good handling* |

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 97** | **PASAL 97** | **PASAL 97** |
| pengembangan Perkebunan berkelanjutan.<br>Ayat (2)<br>Cukup Jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup Jelas | *practices)* dan *good manufactuing practices*, dan penerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | *practices)* dan *good manufactuing practices*, dan penerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 30

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 99** | **PASAL 99** | **PASAL 99** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 31

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 103** | **PASAL 103** | **PASAL 103** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 32

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 33

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 106** | **PASAL 106** | **PASAL 106** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 34

| UU PERKEBUNAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 109** | **PASAL 109** | **PASAL 109** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

## E. UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

### Pasal 30

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[4] |
|---|---|---|
| **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** |
| (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.<br>(2) Surat permohonan hak PVT harus memuat:<br>a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;<br>b. nama dan alamat lengkap pemohon;<br>c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;<br>d. nama varietas;<br>e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;<br>f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang | (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan pajak.<br>(2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:<br>a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; atau | (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.<br>(2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:<br>a orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; atau<br>b ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. |

[4] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 30 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020
Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023 yakni perubahan pengaturan seperti yang ada dalam angka 1 yang mengubah penangaturan dalam Pasal 11, perbaikan rujukan ayat seperti yang terdapat pada angka 3, yang memuat perubahan Pasal 2 angka 29 dan perbaikan tata bahasa sebagaimana pada penjelasa angka 1 yang memuat perubahan penjelasaan Pasal 11.

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[4] |
|---|---|---|
| **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** |
| diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.<br>(3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:<br>a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;<br>b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.<br>(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.<br>(5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. | b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[4] |
|---|---|---|
| **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** |
| • Konsideran menimbang pembentukan PP ini adalah Pasal 28 dan Pasal 157 ayat (2) UU 11/2020 yang tidak mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana melainkan mengatur mengenai undang-undnag yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah pengaturan baru di bidang pertanian.<br>Konsideran menimbang dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak menyebutkan Pasal 29 UU 11/2020, namun dalam bagian mengingatnya disebutkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai salah satu dasarnya. Meski demikian, PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT, pada BAB III PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN. | | |

**2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 29** | **Pasal 29** | **PASAL 29** |
| (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.<br>(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri. | (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.<br>(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. | (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan substantif.<br>(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. |

**3. Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 40** | **Pasal 40** | **Pasal 40** |
| (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:<br>a. pewarisan;<br>b. hibah;<br>c. wasiat;<br>d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau<br>e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.<br>(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.<br>(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.<br>(4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah | (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:<br>a. pewarisan;<br>b. hibah;<br>c. wasiat;<br>d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau<br>e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.<br>(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.<br>(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan pajak.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:<br>a. pewarisan;<br>b. hibah;<br>c. wasiat;<br>d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau<br>e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.<br>(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.<br>(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:** | | |

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 40** | **Pasal 40** | **Pasal 40** |
| ● Belum dibentuk PP yang diamanatkan UU 11/2020.<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT. | | |

**4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 43** | **Pasal 43** | **Pasal 43** |
| (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.<br>(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<br>(3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.<br>(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.<br>(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur mengenai perjanjian lisensi PVT.<br>● Belum dibentuk PP yang diamanatkan UU 11/2020. | | |

**5. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 63** | **Pasal 63** | **Pasal 63** |
| (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.<br>(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.<br>(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri | (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.<br>(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.<br>(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. | (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.<br>(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.<br>(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** |

| | | |
|---|---|---|
| Ayat (1)<br>Bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan.<br>Ayat (2)<br>butir a<br>Cukup jelas<br>butir b<br>Cukup jelas<br>butir c<br>Cukup jelas<br>butir d<br>Cukup jelas<br>butir e<br>Yang dimaksud dengan ciri-dri morfologi yaitu antara lain ciri-ciri tanaman yang tampak jelas berupa bentuk, ukuran, dan warna dari bagian-bagian tanaman.<br>butir f<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah varietas Yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan aman di sini adalah | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai bentuk formulir permohonan dan tata cara pengisiannya, serta komponen dan besarnya biaya pemrosesan permohonan, contoh surat kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas transgenik. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai bentuk formulir permohonan dan tata cara pengisiannya, serta komponen dan besarnya biaya pemrosesan permohonan, contoh surat kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas transgenik. |

| | | |
|---|---|---|
| tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pernbuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil perneriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik.<br>Ayat (5)<br>Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi bentuk formulir permohonan dan tatacara pengisiannya, serta komponen dan tiesarnya biaya pernrosesan permohonan, contoh surat kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas transgenik. | | |

Angka 2

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 29** | **Pasal 29** | **Pasal 29** |

| | | |
|---|---|---|
| Ayat (1)<br>Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas | Ayat (1)<br>Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |

Angka 3

| **UU Perlindungan Varietas Tanaman** | **UU 11/2020** | **LAMPIRAN UU 6/2023** |
|---|---|---|
| **Pasal 40** | **Pasal 40** | **Pasal 40** |
| Ayat (1)<br>Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br>Ayat (4)<br>Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah meliputi persyaratan pengalihan, fcrmulir permohonan pengalihan dan dokumen kelengkapannya, serta | Ayat (1)<br>Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain.<br>Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang" misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur | Ayat (1)<br>Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain.<br>Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang" misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai persyaratan pengalihan, formulir |

| | | |
|---|---|---|
| komponen dan besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT. | mengenai persyaratan pengalihan, formulir permohonan pengalihan dan dokumen kelengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT | permohonan pengalihan dan dokumen kelengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT |

Angka 4

| UU Perlindungan Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 43** | **Pasal 43** | **Pasal 43** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut. | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut. | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut. |

Angka 5

| UU Varietas Tanaman | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 63** | **Pasal 63** | **Pasal 63** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan pemegang lisensi adaiah | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| | | |
|---|---|---|
| termasuk pemegang Lisensi Wajib.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas | | |

## F. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

### Pasal 31

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:<br>a. dilakukan kajian strategis;<br>b. disusun rencana alih fungsi lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan<br>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. (4) Alih fungsi | (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya pertanian.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:<br>a. dilakukan kajian strategis; | (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Budi Daya Pertanian.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan Budi Daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:<br>a. dilakukan kajian strategis; |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap. | b. disusun rencana alih fungsi Lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau<br>d. disediakan Lahan budi daya Pertanian. pengganti terhadap Lahan Budi daya Pertanian.<br>(4) Alih fungsi Lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian lahan budi daya Pertanian diatur dalam **peraturan Pemerintah.** | b. disusun rencana alih fungsi Lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau<br>d. disediakan Lahan. pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.<br>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |

**Catatan:**

- Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menyebutkan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU 11/2020 sebagai dasar menimbangnya namun apabila diperhatikan kembali ketentuan Pasal 28 UU 11/2020 tidak mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana namun mengatur mengenai undang-undang yang diubah, dicabut atau ditetapkan peraturan baru dalam rangka perijinan berusaha bidang pertanian.

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| ● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak menyebutkan Pasal 31 UU 11/2020 dalam konsideran menimbangnya, namun pada bagian mengingat disebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan didalam PP tersebut diatur mengenai alih fungsi lahan budi daya pertanian, tepatnya pada Pasal 103 sampai Pasal 111.<br>● Selama ini pelaksanaan pengalihfungsian lahan budi daya pertanian mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. | | |

2. **Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan. | (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan;<br>b. pengenaan denda administratif;<br>c. paksaan Pemerintah;<br>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, | (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan;<br>b. pengenaan denda administratif;<br>c. paksaan Pemerintah;<br>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha. |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| | besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko | | |

3. **Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.<br>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih unggul dari wilayah | (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih unggul dari wilayah |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| | Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran Benih harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran Benih harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Pengaturan mengenai perijinan berusaha di bidang pangan diatur Bab III Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Bagian Ketiga Sektor Pertanian. | | |

4. **Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 43** | **PASAL 43** | **PASAL 43** |
| Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri. | Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat. | Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |

5. **Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut**:

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:<br>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau<br>c. memenuhi keperluan di dalam negeri.<br>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. | (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapai dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. | (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapai dilakukan untuk:<br>a meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>b mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/ atau<br>c memenuhi keperluan di dalam negeri.<br>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. |

6. **Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 86** | **PASAL 86** | **PASAL 86** |
| (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.<br>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha. | (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.<br>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha. | (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.<br>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha. |

7. **Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 102** | **PASAL 102** | **PASAL 102** |
| (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya | (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya pertanian Berkelanjutan.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 102** | **PASAL 102** | **PASAL 102** |
| berkewajiban membangun, men5rusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.<br>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:<br>a. perencanaan<br>b. pemantauan dan evaluasi;<br>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan<br>d. pertimbangan penanaman modal.<br>(4) Kewajiban Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.<br>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. | sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.<br>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:<br>a. perencanaan;<br>b. pemantauan dan evaluasi;<br>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan<br>d. pertimbangan penanaman modal.<br>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.<br>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. | sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.<br>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:<br>a. perencanaan;<br>b. pemantauan dan evaluasi;<br>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan<br>d. pertimbangan penanaman modal.<br>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.<br>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 102** | **PASAL 102** | **PASAL 102** |
| | (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.<br>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.<br>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menyebutkan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU 11/2020 sebagai dasar menimbangnya namun apabila diperhatikan kembali ketentuan Pasal 28 UU 11/2020 tidak mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana namun mengatur mengenai undang-undang yang diubah, dicabut atau ditetapkan peraturan baru dalam rangka perijinan berusaha bidang pertanian.<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak menyebutkan Pasal 31 UU 11/2020 dalam konsideran menimbangnya, namun pada bagian mengingat disebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan didalam PP tersebut diatur mengenai sistem informasi pertanian, tepatnya pada Bab VII Sistem Informasi. | | |

8. **Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 108** | **PASAL 108** | **PASAL 108** |
| (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:<br>a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), | (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:<br>a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), | (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:<br>a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 108** | **PASAL 108** | **PASAL 108** |
| Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;<br>b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan<br>c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).<br>(2) Sanksi administratif ayat (1) dapat berupa: sebagaimana dimaksud pada<br>a. teguran tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>d. penarikan produk dari peredaran;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), atau Pasal 19;<br>b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3); atau<br>c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>d. penarikan produk dari peredaran;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud | Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), atau Pasal 79;<br>b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3); atau<br>c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>d. penarikan produk dari peredaran;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 108** | **PASAL 108** | **PASAL 108** |
| | pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>● Belum dibentuk peraturan pelaksana.<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko tidak mengatur mengenai sistem budi daya pertanian berkelanjutan<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian hanya mengatur sanksi di bidang perkebunan dan holtikultura | | |

9. **Ketentuan Pasal 111 Dihapus.**

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 111** | **PASAL 111** | **PASAL 111** |
| Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Dihapus | Dihapus |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan 'Jaringan pengairan lengkap" adalah satu kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian yang dilengkapi dengan bangunan ukur di seluruh bangunan pembaginya. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| Persetujuan antara masyarakat hukum adat dengan Pelaku Usaha dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 3

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas | Cukup jelas |

Angka 4

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| Cukup jelas | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 5

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 44** | **Pasal 44** | **Pasal 44** |
| Cukup jelas | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 6

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 86** | **Pasal 86** | **Pasal 86** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 86** | **Pasal 86** | **Pasal 86** |
| melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 7

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 102** | **Pasal 102** | **Pasal 102** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme pengganggu Tumbuhan serta hama dan | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br>Ayat (4)<br>Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme pengganggu | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br>Ayat (4)<br>Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme Pengganggu |

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 102** | **Pasal 102** | **Pasal 102** |
| penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas | Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas. | Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas. |

Angka 8

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 108** | **Pasal 108** | **Pasal 108** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 9

| UU SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 111** | **Pasal 111** | **Pasal 111** |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

## G. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 32

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5433) Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[5] |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.<br>(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.<br>(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri. | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.<br>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.<br>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). |

[5] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 32 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020
Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023 yakni perbaikan tata bahasa sebagaimana pada angka 1 yang memuat perubahan Pasal 15.

**2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.<br>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. | (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.<br>(2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. | (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani.<br>(2) Impor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |

**3. Ketentuan Pasal 101dihapus.**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana | Dihapus | Dihapus |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Ketentuan mengenai pengaturan impor Komoditas Pertanian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas harga Komoditas Pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga Petani mendapatkan keuntungan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi" | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi" |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 3

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

## H. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA

### Pasal 33

Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[6] |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.<br>(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.<br>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana | (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.<br>(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. lebih efisien; b. ramah lingkungan; dan c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana | (1) Pelaku Usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.<br>(2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

[6] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 33 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020
Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023 yakni perubahan pengaturan seperti yang ada dalam angka 1 yang mengubah penangaturan dalam Pasal 15 dan perbaikan tata bahasa sebagaimana pada angka 9 yang memuat perubahan Pasal 54.

| | | |
|---|---|---|
| dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. | hortikultura diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| **UU HORTIKULTURA** | **UU 11/2020** | **LAMPIRAN UU 6/2023** |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.<br>(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.<br>(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagimana dmaksud pada ayat (2) harus:<br>a. lebih efisein;<br>b. ramah lingkungan; dan<br>c. diutamkaan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri. | (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan pengguna sarana hortikultura dalam negeri.<br>(2) Dalam hal sarana holtikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana holtikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:<br>a. lebih efisien;<br>b. ramah lingkungan; dan<br>c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan pengguna Sarana Hortikultura dalam negeri.<br>(2) Dalam hal Sarana Holtikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan Sarana Holtikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Sarana Hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:<br>a. lebih efisien;<br>b. ramah lingkungan; dan<br>c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:** | | |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| ● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.<br>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.<br>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.<br>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.<br>(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.<br>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis minimal.<br>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji | (1) Sarana Hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.<br>(2) Dalam hal Sarana Hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.<br>(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis minimal.<br>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana Hortikultura produksi lokal yang |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| | mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

4. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 35A** | **PASAL 35A** |
| - | (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. penghentian kegiatan usaha;<br>b. penarikan produk yang dipasarkan;<br>c. denda administratif;<br>d. paksaan pemerintah; dan/atau | (1) Setiap Orang yang mengedarkan sarana Hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. penghentian kegiatan usaha;<br>b. penarikan produk yang dipasarkan; |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 35A** | **PASAL 35A** |
| | e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | c. denda administratif;<br>d. paksaan pemerintah; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

5. Pasal 48 dihapus.

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:<br>a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;<br>b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;<br>c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan<br>d. unit usahabudidaya hortikultura besar.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagimana dimaksud pada ayat (1) | Dihapus | Dihapus |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 48 | PASAL 48 | PASAL 48 |
| diatur dengan Peraturan Menteri. | | |

6. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 49 | PASAL 49 | PASAL 49 |
| (3) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.<br>(4) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.<br>(5) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura | (1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah.<br>(2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan unit usaha budi daya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | (1) Unit Usaha Budi Daya Hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah.<br>(2) Unit Usaha Budi Daya Hortikultura menengah dan unit usaha budi daya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| diatur dengan Peraturan Menteri. | | |

7. Pasal 51 dihapus.

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 51** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| (1) Usaha hortikulturan dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri. | Dihapus | Dihapus |

8. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 52** | **PASAL 52** | **PASAL 52** |
| (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.<br>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri. | (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.<br>(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.<br>(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura. | (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.<br>(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.<br>(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Pelaku Usaha dalam melaksanakan Usaha Hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.<br>(2) Pelaku Usaha dalam memproduksi Produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.<br>(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi pengembangan Usaha Hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 56** | **PASAL 56** | **PASAL 56** |
| (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.<br>(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.<br>(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.<br>(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:<br>a. inti-plasma;<br>b. subkontrak;<br>c. waralaba;<br>d. perdagangan umum;<br>e. distribusi dan keagenan; dan<br>f. bentuk-bentuk kemitraan lain. | (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.<br>(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.<br>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:<br>a. inti-plasma;<br>b. subkontrak;<br>c. waralaba;<br>d. perdagangan umum;<br>e. distribusi dan keagenan; dan<br>f. bentuk-bentuk kemitraan lainnya.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Usaha Hortikultura dapat dilakukan dengan pola Kemitraan.<br>(2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku Usaha Hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.<br>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:<br>a. inti-plasma;<br>b. subkontrak;<br>c. waralaba;<br>d. perdagangan umum;<br>e. distribusi dan keagenan; dan<br>f. bentuk-bentuk kemitraan lainnya.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| Catatan:<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 57** | **PASAL 57** | **PASAL 57** |
| (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke | (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran | (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi Benih, Sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 57** | **PASAL 57** | **PASAL 57** |
| wilayah negara Republik Indonesia.<br>(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.<br>(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.<br>(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi | benih dari dan pemasukan benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<br>(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.<br>(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.<br>(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan | Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<br>(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.<br>(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu Benih melalui penerapan Sertifikasi.<br>(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran dan |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 57** | **PASAL 57** | **PASAL 57** |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. | pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikasi kompetensi, Sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

12. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 63** | **PASAL 63** | **PASAL 63** |
| (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.<br>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.<br>(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesisa untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. | Dihapus | Dihapus |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 63** | **PASAL 63** | **PASAL 63** |
| (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. | | |

13. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.<br>(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.<br>(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. | Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

14. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 73** | **PASAL 73** | **PASAL 73** |
| (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.<br>(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.<br>(3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana | (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang serta antara pedagang dan konsumen.<br>(2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. | (1) Usaha perdagangan Produk Hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang serta antara pedagang dan konsumen.<br>(2) Pelaku Usaha perdagangan Produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 73** | **PASAL 73** | **PASAL 73** |
| dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. | | |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

15. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:<br>a. keamanan pangan produk hortikultura;<br>b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;<br>c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;<br>d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; dan<br>e. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.<br>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.<br>(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan | (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:<br>a. keamanan pangan produk hortikultura;<br>b. persyaratan kemasan dan pelabelan;<br>c. standar mutu; dan<br>d. ketentuan keamanan dan pelindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.<br>(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut | (1) Impor Produk Hortikultura wajib memperhatikan aspek:<br>a. keamanan pangan Produk Hortikultura;<br>b. persyaratan kemasan dan pelabelan;<br>c. standar mutu; dan<br>d. ketentuan keamanan dan pelindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.<br>(2) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan |

| | | |
|---|---|---|
| melalui pintu masuk yang ditetapkan.<br>(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. | mengenai pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | melalui pintu masuk yang ditetapkan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko | | |

16. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 90** | **PASAL 90** | **PASAL 90** |
| Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:<br>a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau<br>b. mengendalikan impor dan ekspor | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar. | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran Produk Hortikultura. |

17. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.<br>(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai. | (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.<br>(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai. | (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan Produk Hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan Produk Hortikultura lokal dan asal impor.<br>(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai. |

18. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100** | **PASAL 100** | **PASAL 100** |
| (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.<br>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.<br>(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).<br>(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.<br>(5) Penanam modal asing | (1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. | (1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam Usaha Hortikultura.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. |

| | | |
|---|---|---|
| sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. | | |

19. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri. | Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi. | Pelaku Usaha Hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi. |

20. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 122** | **PASAL 122** | **PASAL 122** |
| (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: | (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) atau ayat (21, Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) atau ayat (21, Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 122** | **PASAL 122** | **PASAL 122** |
| a. peringatan secara tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan;<br>d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. | a. peringatan secara tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan;<br>d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | a. peringatan secara tertulis;<br>b. denda administratif;<br>c. penghentian sementara kegiatan;<br>d. penarikan produk dari peredaran oleh Pelaku Usaha;<br>e. pencabutan izin; dan/atau<br>f. penutupan usaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko | | |

21. Pasal 126 dihapus.

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 126** | **PASAL 126** | **PASAL 126** |
| (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis, dan/ atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun | Dihapus | Dihapus |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 126 | PASAL 126 | PASAL 126 |
| atau denda pidana paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).<br><br>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) | | |

22. Pasal 131 dihapus.

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 131 | PASAL 131 | PASAL 131 |
| (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecual untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<br><br>(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanaman modal asing yang sudah | Dihapus | Dihapus |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 131 | PASAL 131 | PASAL 131 |
| melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 33

Angka 1

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 15 | PASAL 15 | PASAL 15 |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "kemampuan tertentu" adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 3

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "sarana hortikultura produksi lokal" adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 4

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 35A** | **PASAL 35A** |
| | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 5

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 6

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| **Ayat (1)**<br>Pendataan dilakukan dalam | **Ayat (1)**<br>Pendataan dilakukan dalam | **Ayat (1)**<br>Pendataan dilakukan |

| | | |
|---|---|---|
| rangka pembinaan dan pemberdayaan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | rangka pembinaan dan pemberdayaan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. |

Angka 7

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 51** | **PASAL 51** | **PASAL 51** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 8

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 52** | **PASAL 52** | **PASAL 52** |
| **Ayat (1)**<br>Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.<br>**Ayat (2)**<br>Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 9

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah batasan terendah dari | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis minimal" adalah batasan | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis minimal" adalah batasan |

| | | |
|---|---|---|
| spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "keamanan pangan produk hortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar Usaha Hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "keamanan pangan Produk Hortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan Produk Hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

Angka 10

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 56** | **PASAL 56** | **PASAL 56** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro danf atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro danf atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 56** | **PASAL 56** | **PASAL 56** |
| menguntungkan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman. Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | memperkuat, dan saling menguntungkan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lainnya" seperti kontrak budi daya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint uenhtrel)*, dan penyumberluaran (*outsourcing*). Kontrak budi daya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman. Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budi daya, manajemen, sampai dengan pemasaran.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" seperti kontrak budi daya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint uenhtrel)*, dan penyumberluaran (*outsourcing*). Kontrak budi daya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman. Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budi daya, manajemen, sampai dengan pemasaran.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

Angka 11

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 57** | **PASAL 57** | **PASAL 57** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk benih atau materi induk" adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk" adalah pemasukan Benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk" adalah pemasukan Benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. |

Angka 12

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 63** | **PASAL 63** | **PASAL 63** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila | Dihapus. | Dihapus. |

| | | |
|---|---|---|
| kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 13

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 14

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 73** | **PASAL 73** | **PASAL 73** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 15

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phitosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phitosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phitosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. |

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| **Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (3)**<br>Penetapan "pintu masuk" bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPI Karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (3)**<br>Penetapan "pintu masuk" bagi impor Produk Hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPI Karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

Angka 16

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 90** | **PASAL 90** | **PASAL 90** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 17

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 18

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 100** | **PASAL 100** | **PASAL 100** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 19

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 101** | **PASAL 101** | **PASAL 101** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 20

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 122** | **PASAL 122** | **PASAL 122** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 21

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 126** | **PASAL 126** | **PASAL 126** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

Angka 22

| UU HORTIKULTURA | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 131** | **PASAL 131** | **PASAL 131** |
| Cukup jelas. | Dihapus. | Dihapus. |

## I. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### PASAL 34

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 6** | **PASAL 6** | **PASAL 6** |
| (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.<br>(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:<br>a. penghasil tumbuhan pakan;<br>b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan | (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.<br>(2) Kawasan penggembalaan umum sebagimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:<br>a. penghasilan tumbuhan pakan;<br>b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; | (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.<br>(2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:<br>e. penghasilan tumbuhan Pakan;<br>f. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan;<br>g. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/ atau |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 6** | **PASAL 6** | **PASAL 6** |
| inseminasi buatan;<br>c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau<br>d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.<br>(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.<br>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber | c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ atau<br>d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.<br>(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.<br>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.<br>(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan | h. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan Dan Kesehatan Hewan.<br>(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.<br>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan Peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak Murah.<br>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan Kawasan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 6** | **PASAL 6** | **PASAL 6** |
| pakan ternak murah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. | lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah** | Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan **Peraturan pemerintah** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 13** | **PASAL 13** | **PASAL 13** |
| (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.<br>(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan**,** pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit**.** | (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, danlatau bakalan. | (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.<br>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.<br>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau |

| | | |
|---|---|---|
| (3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.<br>(4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.<br>(5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.<br>(6) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat | (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.<br>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.<br>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.<br>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5). | pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.<br>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.<br>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.<br>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |

| | | |
|---|---|---|
| keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.<br>(7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.<br>(8) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6). | | |
| **Catatan:**<br>• Pasal 13 pernah diubah melalui UU 41/2014<br>• Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:<br>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br>c. mengatasi kekurangan Benih | (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:<br>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br>c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau | (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:<br>a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;<br>b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br>c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau<br>d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.<br>(2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:<br>a. memenuhi persyaratan mutu;<br>b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;<br>c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;<br>d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan; dan<br>e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. | d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. | | |
| **Catatan:**<br>• Pasal 15 pernah diubah melalui UU 41/2014<br>• Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.<br>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam | (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.<br>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuht Perizinan | (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.<br>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib |

| | | |
|---|---|---|
| negeri.<br>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. | Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Pasal 15 pernah diubah melalui UU 41/2014<br>• Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>• Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko | | |

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.<br>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<br>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundangundangan. | (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai | (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| (4) Setiap orang dilarang:<br>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;<br>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau<br>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri. | dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Setiap orang dilarang:<br>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;<br>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau<br>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | yang baik yang diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** [7]<br>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Setiap orang dilarang:<br>a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;<br>b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau<br>c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan. |

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| | | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>• Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.<br>(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. | (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.<br>(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan | (1) Budi daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus.<br>(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai |

| | | |
|---|---|---|
| (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.<br>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.<br>(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar. | kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.<br>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha. | dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.<br>(4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha. |

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.<br>(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan usaha budi daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.<br>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. |

8. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk | (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan | (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.<br>(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.<br>(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.<br>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.<br>(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.<br>(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:<br>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;<br>b. bebas dari Penyakit | dengan memperhatikan kepentingan peternak.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:<br>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;<br>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan<br>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | memperhatikan kepentingan Peternak.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:<br>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;<br>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan<br>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan<br>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.<br>(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri dikembangbiakan di Indonesia harus:<br>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;<br>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan<br>c. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan.<br>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. | | **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>• Pasal 36B ditambahkan melalui UU 41/2014 | | |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| • Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<br>• Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko | | |

9. Ketentuan Pasal 36C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36C** | **PASAL 36C** | **PASAL 36C** |
| (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.<br>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.<br>(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud | (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.<br>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.<br>(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:<br>a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner | (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.<br>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.<br>(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36C** | **PASAL 36C** | **PASAL 36C** |
| pada ayat (2) juga harus terlebih dahuiu:<br>a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;<br>b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan<br>c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.<br>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. | negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;<br>b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan<br>c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.<br>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:<br>a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;<br>b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilans di dalam negeri; dan<br>c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.<br>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36C** | **PASAL 36C** | **PASAL 36C** |
| | | Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Belum dibentuk peraturan pelaksana amanat UU 11/2020<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko tidak mengatur mengenai ternak ruminansia.<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur mengenai ternak ruminansia.<br>● Namun sebelum diamanatkan melalui peraturan pemerintah, hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | | |

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.<br>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.<br>(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama: | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan. | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| a. Permodalan atau pembiayaan;<br>b. pengolahan;<br>c. pemasaran;<br>d. pendistribusian; dan/atau<br>e. rantai pasok.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. | | |
| **Catatan:**<br>Pasal ini pernah diubah melalui UU 41/2014 | | |

11. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 52** | **PASAL 52** | **PASAL 52** |
| (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:<br>a. berupa sediaan biologik yang | (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang | (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 52** | **PASAL 52** | **PASAL 52** |
| penyakitnya tidak ada di Indonesia;<br>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;<br>c. tidak diberi label dan tanda; dan<br>d. tidak memenuhi standar mutu. | ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:<br>a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;<br>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;<br>c. tidak diberi label dan tanda; dan<br>d. tidak memenuhi standar mutu.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:<br>a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;<br>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;<br>c. tidak diberi label dan tanda; dan<br>d. tidak memenuhi standar mutu.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.<br>(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau | (1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan | (1) Penyediaan Obat Hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Obat Hewan sebagaimana dimaksud |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.<br>(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.<br>(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

13. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| (1) Setiap Orang yang akan memasukkan produk Hewan ke daiam wilayah Negara Kesatuan | (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara | (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:<br>a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau<br>b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.<br>(2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan.<br>(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum | Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizrnan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.<br>(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional. | | |
| **Catatan:**<br>● Pasal 59 pernah diubah melalui UU 41/2014<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

14. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah | (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah | (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol Veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.<br>(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner. | provinsi sesuai dengan kewenanganya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 62** | **PASAL 62** | **PASAL 62** |
| (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.<br>(2) Rumah potong hewan | (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.<br>(2) Rumah potong hewan | (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.<br>(2) Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 62** | **PASAL 62** | **PASAL 62** |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.<br>(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memenuhi Peizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Usaha rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 69** | **PASAL 69** | **PASAL 69** |
| (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik | (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik | (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 69** | **PASAL 69** | **PASAL 69** |
| veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.<br>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota. | veteriner, danf atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.<br>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah**.** | Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.<br>(2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 72** | **PASAL 72** | **PASAL 72** |
| (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.<br>(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan | (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di | (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Tenaga asing Kesehatan Hewan dapat melakukan praktik pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 72** | **PASAL 72** | **PASAL 72** |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. | wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peizrnan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

18. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), | (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat(2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 36B ayat (2), Pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 85 | PASAL 85 | PASAL 85 |
| Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), pasal 36B ayat (4), Pasal 36B ayat (5), Pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), pasal 62 ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. pengenaan denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;<br>c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat | ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 6l ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. peringatan secara tertulis;<br>penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. pencabutan Perizinan Berusaha dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>e. pengenaan denda.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif | Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (l), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa:<br>a. peringatan secara tertulis;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. pencabutan Perizinan Berusaha dan penarikan Obat Hewan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Alat dan Mesin Kesehatan Hewan, atau Produk Hewan dari peredaran;<br>d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>e. pengenaan denda.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau<br>d. pencabutan izin.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah. | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Pasal ini pernah diubah melalui UU 41/2014<br>● PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | | |

19. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan | Setiap orang yang memproduksi dan /atau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (31 yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 88 | PASAL 88 | PASAL 88 |
| paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 6 | PASAL 6 | PASAL 6 |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan" adalah upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam program pembangunan daerah.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "kastrasi” adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan", adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memasukkan kawasan penggembalaan umum dalam program pembangunan daerah.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "kastrasi" adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan' adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam program pembangunan daerah.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "kastrasi" adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 6** | **PASAL 6** | **PASAL 6** |
| **Ayat (3)**<br>Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum" yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (3)**<br>Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum" yaitu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum" adalah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain tanah pangonan, tanah titisara, atau tanah kas desa.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Cukup jelas. |
| **Catatan:**<br>Penjelasan Pasal 6 ini pernah diubah melalui UU 41/2014 namun substansi pasalnya tidak mengalami perubahan | | |

Angka 2

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 13** | **PASAL 13** | **PASAL 13** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Teknologi reproduksi untuk mengembangbiakan | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 13** | **PASAL 13** | **PASAL 13** |
| hewan antara lain melalui alih janin (transfer embrio), kelahiran kembar (twinning), dan pemisahan sperma (sexing) antara kromosom X dan kromosom Y.<br><br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 3

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi keunggulan sifat individu.<br>Yang dimaksud dengan "keragaman genetik" adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "kekurangan Benih" yaitu ketidakcukupan jumlah Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemuliaan | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi keunggulan sifat individu.<br>Yang dimaksud dengan "keragaman genetik" adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antar individu.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "kekurangan Benih" yaitu ketidak cukupan jumlah Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi keunggulan sifat individu.<br>Yang dimaksud dengan "keragaman genetilf adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf C<br>Yang dimaksud dengan "kekurangan Benih" adalah ketidakcukupan jumlah Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau mutu genetik.<br>Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | meningkatkan produktivitas dan/ atau mutu genetik. Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | meningkatkan produktivitas dan/ atau mutu genetik.<br>Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" adalah ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br><br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. |

Angka 4

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, yang telah dikembangbiakkan di | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, ydng telah | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, yang telah |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 16** | **PASAL 16** | **PASAL 16** |
| Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.<br>**Ayat (2)**<br>Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli dan lokal.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.<br>**Ayat (2)**<br>Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli dan lokal.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.<br>**Ayat (2)**<br>Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli dan lokal.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

Angka 5

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cara pembuatan Pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan Pakan hart's menjamin Pakan tidak mengandung cemaran biologi, Iisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| ikutan yang digunakan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:<br>1. tidak berlabel;<br>2. kedaluwarsa;<br>3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau<br>4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.<br>Huruf b<br>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau scrapie pada domba/kambing. Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak. Huruf c<br>Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracycline*. | ikutan yang digunakan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "pakan yang tidak layak dikonsumsi" diantaranya yaitu pakan yang:<br>1. tidak berlabel;<br>2. kedaluwarsa;<br>3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau<br>4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.<br>Huruf b<br>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila *(bouine spongiform encephalopathg)* atau *scrapie* pada domba/kambing.<br>Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan | ikutan yang digunakan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "pakan yang tidak layak dikonsumsi" antara lain Pakan yang:<br>1. tidak berlabel;<br>2. kedaluwarsa;<br>3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau<br>4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.<br>Huruf b<br>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila *(bouine spongifurm enephalopathg)* atau *scrapie* pada domba/kambing.<br>Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, *chloramphecinol* dan *tetracycline*. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 22** | **PASAL 22** | **PASAL 22** |
| **Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | "antibiotik", antara lain, *chloramphecinol* dan *tetracycline*.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (5)**<br>Cukup jelas. |

Angka 6

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.<br>Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai skala tertentu dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan usaha peternakan agar sesuai dengan persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat *veteriner*.<br>**Ayat (4)** | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus", antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus" antara lain kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, dan kelinci untuk penelitian.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" antara lain kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | peraturan perundang-undangan.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. |

Angka 7

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 8

| UU 18/2009 | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Yang dimaksud dengan "nilai tambah" antara lain, berat maksimal, netralisir residu, dan penyerapan tenaga kerja. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU 18/2009 | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36B** | **PASAL 36B** | **PASAL 36B** |
| **Ayat (6)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (7)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (8)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 9

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 36C** | **PASAL 36C** |
| | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 10

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh). Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku dari dalam negeri”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah dalam negeri.<br>**Ayat (2)** | Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan" adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan. | Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan" adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil Hewan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil peternakan harus dapat dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan, termasuk peternak yang bergerak di bidang budi daya peternakan melalui berbagai pola kemitraan usaha industri pengolahan hasil peternakan, misalnya, kemitraan industri pengolahan susu dengan peternak sapi perah dalam bentuk koperasi dan inti plasma serta kemitraan dengan kalangan pendidikan untuk meningkatkan usaha dan gizi.<br>**Ayat (3)**<br>Termasuk ketentuan yang diatur adalah keberpihakan industri untuk menggunakan bahan baku lokal (dalam negeri). | | |

Angka 11

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 52** | **PASAL 52** | **PASAL 52** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a |

| | | |
|---|---|---|
| Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik. | Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi standar mutu", yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi standar mutu", yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. |

Angka 12

| **UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | **UU 11/2020** | **LAMPIRAN UU 6/2023** |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” yaitu kecukupan kebutuhan dalam negeri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 13

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "produk hewan segar" adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, daging, telur, susu, dan tulang.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "produk hewan olahan" adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang telah diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, bakso, nugget, dan daging dalam kaleng.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "zona dalam suatu negara" adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas. Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan", antara lain, memiliki:<br>1. hasil analisis risiko penyakit hewan menular, terutama penyakit eksotik pada negara atau zona suatu negara, sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akandiekspor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis risiko juga dapat diterapkan pada rencana pemasukkan hewan.<br>2. nomor registrasi (establishment number) untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br>3. rekomendasi dari otoritas veteriner bahwa importasi produk hewan dinyatakan aman bagi konsumen, sumber daya hewan, dan lingkungan, serta tidak mengganggu kepentingan nasional. | | |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| 4. kesesuaian dengan ketentuan internasional yang relevan, antara lain, dari badan kesehatan hewan dunia (*World Organization for Animal Health, WOAH*) dan/atau *Codex Alimentarius Commission* (CAC) Yang dimaksud dengan "tata cara pemasukan produk hewan" adalah memenuhi ketentuan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Persyaratan dan tata cara pemasukkan produk hewan dari luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional dan risiko kemungkinan terbawanya agen penyakit hewan menular melalui produk hewan dengan tujuan untuk menjamin produk hewan yang masuk dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, juga harus diperhatikan ketentuan Internasional, antara lain, Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan/atau *Codex* | | |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 59** | **PASAL 59** | **PASAL 59** |
| *Alimentarius Comission* (CAC). Yang dimaksud dengan "analisis risiko" adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 14

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "nomor kontrol veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "nomor kontrol Veteriner" atau NKV adalah nomor registrasi unit usaha Produk Hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan Produk Hewan.<br>Bagi unit usaha Produk Hewan yang mengedarkan Produk Hewan segar di seluruh wilayah Negara | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "nomor kontrol Veteriner" atau NKV adalah nomor registrasi unit usaha Produk Hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan Produk Hewan.<br>Bagi unit usaha Produk Hewan yang mengedarkan Produk Hewan segar di seluruh wilayah Negara |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 60** | **PASAL 60** | **PASAL 60** |
| wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 15

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 62** | **PASAL 62** | **PASAL 62** |
| **Ayat (1)**<br>Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari bupati atau walikota dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan | **Ayat (1)**<br>Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten kota memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten kota memiliki rumah potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal Hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 62** | **PASAL 62** | **PASAL 62** |
| milik orang lain. | | |

Angka 16

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 69** | **PASAL 69** | **PASAL 69** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:<br>a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;<br>b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;<br>c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; | Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan Kesehatan Hewan" adalah serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain untuk:<br>a melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;<br>b melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal *(prior informed consent)* kepada pemilik Hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan mal praktik;<br>c melakukan pemeriksaan dan |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 69 | PASAL 69 | PASAL 69 |
| d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;<br>e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;<br>f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan<br>g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" | | pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;<br>d melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan;<br>e menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada Otoritas Veteriner;<br>f menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan<br>g melakukan pendidikan klien dan/ atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan Hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium Veteriner" |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 69 | PASAL 69 | PASAL 69 |
| adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.<br>Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.<br>Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. | | adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan Kesehatan Hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan atau Zoonosis, pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu Pakan, mutu Bibit/Benih, dan/atau mutu Produk Hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa Medik Veteriner'' adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan, seperti rumah sakit Hewan, klinik Hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi Hewan, ambulatori, praktik |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 69** | **PASAL 69** | **PASAL 69** |
| Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.<br>**Ayat (2)**<br>Pemberian izin usaha dari bupati/walikota, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan siskeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat. Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupati/walikota tersebut perlu dikonfirmasikan kepada otoritas veteriner tingkat provinsi yang dimaksud. Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:<br>a. Rumah Sakit Hewan; | | Dokter Hewan, dan praktik konsultasi kesehatan Hewan.<br>Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa Medik Veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/ atau terintegrasi dengan laboratorium Veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner.<br>**Ayat (2)**<br>Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain:<br>a rumah sakit Hewan;<br>b praktik kedokteran Hewan; dan<br>c laboratorium Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas |

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 69** | **PASAL 69** | **PASAL 69** |
| b. Praktik Kedokteran Hewan; dan<br>c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 17

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 72** | **PASAL 72** | **PASAL 72** |
| **Ayat (1)**<br>Surat ijin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota adalah berupa Surat Tanda Registrasi. **Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Termasuk ketentuan surat ijin praktik kesehatan hewan untuk tenaga kesehatan hewan asing, antara lain, adalah penguasaan terhadap kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan kemampuan menguasai penyakit hewan tropika. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 18

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 19

| UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## J. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

### Pasal 36

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:<br>a. penunjukan kawasan hutan;<br>b. penataan batas kawasan hutan;<br>c. pemetaan kawasan hutan; dan<br>d. penetapan kawasan hutan.<br>(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. | (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilkukan melalui:<br>a. penunjukan kawasan hutan;<br>b. penataan batas kawasan hutan;<br>c. pemetaan kawasan hutan;dan<br>d. penetapan kawasan hutan.<br>(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. | (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilkukan melalui:<br>a. penunjukan kawasan hutan;<br>b. penataan batas kawasan hutan;<br>c. pemetaan kawasan hutan;dan<br>d. penetapan kawasan hutan.<br>(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| | (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.<br>(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.<br>(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkung, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.<br>(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagimana dimaksud | (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.<br>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan | (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.<br>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan |

| | | |
|---|---|---|
| pada ayat (10 minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proposional. | yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| (1) Perubahan peruntukan untuk fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.<br>(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<br>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan | (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.<br>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.<br>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | | |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26** | **PASAL 26** | **PASAL 26** |
| (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan lindungan dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungkutan hasil hutan bukan kayu. | (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat |

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27** | **PASAL 27** | **PASAL 27** |
| (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi.<br>(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud | (1) Perizinan Berusaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perseorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik negara;<br>d. badan usaha milik daerah; atau | (1) Perizinan Berusaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perseorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik negara;<br>d. badan usaha milik daerah; atau |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27** | **PASAL 27** | **PASAL 27** |
| dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik swasta Indonesia;<br>d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.<br>(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi. | e. badan usaha milik swasta. | e. badan usaha milik swasta. |

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| (1) Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. | (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<br>(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi.<br>(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik swasta Indonesia;<br>d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.<br>(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik swasta Indonesia;<br>d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.<br>(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi; | Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perseorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik negara;<br>d. badan usaha milik daerah; atau<br>e. badan usaha milik swasta. | Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perseorangan;<br>b. koperasi;<br>c. badan usaha milik negara;<br>d. badan usaha milik daerah; atau<br>e. badan usaha milik swasta. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| c. badan usaha milik swasta Indonesia;<br>d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.<br>(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:<br>a. perorangan;<br>b. koperasi. | | |

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** |
| - | **Pasal 29A**<br>(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.<br>(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:<br>a. Perseorangan;<br>b. Kelompok tani hutan;dan<br>c. Koperasi.<br>**Pasal 29B**<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | **Pasal 29A**<br>(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.<br>(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:<br>a. Perseorangan;<br>b. Kelompok tani hutan;dan<br>c. Koperasi.<br>**Pasal 29B**<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** |
| | | diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |

**Catatan:**
- Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. | Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. | Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. |

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 31** | **PASAL 31** | **PASAL 31** |
| (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dna lestari, makai zin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan asepek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.<br>(2) Pemabahasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.<br>(2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.<br>(2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 31** | **PASAL 31** | **PASAL 31** |
| | | dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| Pemegang izin sebagimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. | Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya. | Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya. |

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan,pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.<br>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.<br>(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri. | (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.<br>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan.<br>(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.<br>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan.<br>(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| | | dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.<br>(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.<br>(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.<br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan.<br>(2) Penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.<br>(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.<br>(4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan penerimaan negara bukan pajak berupa provisi di bidang kehutanan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan.<br>(2) Penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.<br>(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.<br>(4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan penerimaan negara bukan pajak berupa |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| | | provisi di bidang kehutanan.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.<br>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<br>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka | (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.<br>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<br>(3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.<br>(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. | (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.<br>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<br>(3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.<br>(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.<br>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. | | waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.<br>(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. |

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.<br>(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.<br>(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur pelindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.<br>(2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur pelindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.<br>(2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.<br>(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.<br>(4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.<br>(5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya pelindungan hutan.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.<br>(4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.<br>(5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya pelindungan hutan.<br>(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

16. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas | (1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan | (1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. | upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya.<br>(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. | wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya.<br>(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. |

17. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.<br>(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<br>(3) Setiap orang dilarang:<br>a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;<br>b. merambah kawasan hutan;<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius | (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<br>(2) Setiap orang dilarang:<br>a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;<br>b. membakar hutan;<br>c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;<br>d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;<br>e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;<br>f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan | (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<br>(2) Setiap orang dilarang:<br>a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;<br>b. membakar hutan;<br>c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;<br>d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;<br>e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| atau jarak sampai dengan:<br>1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;<br>2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;<br>3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;<br>4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;<br>5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;<br>6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.<br>d. membakar hutan;<br>e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;<br>f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan | kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan<br>g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.<br>(3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;<br>f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan<br>g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.<br>(3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 50 | PASAL 50 | PASAL 50 |
| yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;<br>g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;<br>h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;<br>i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;<br>j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;<br>k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, | | |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;<br>l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan<br>m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.<br>(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| **Catatan:**<br>Adanya Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun didalam hutan dan tidak ditunjukan unutk kepentingan komersial. | | |

18. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 50A** | **PASAL 50A** |
| Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. | (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif.<br>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat | (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif.<br>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat |

19. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu | (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<br>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam | (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<br>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| milyar lima ratus juta rupiah).<br>(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).<br>(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak | Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br>(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak | ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).<br>(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br>(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<br>(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br>(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br>(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br>(11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.<br>(12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. | denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<br>(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br>(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br>(11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.<br>(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.<br>(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. | | dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.<br>(12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. |

20. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 80** | **PASAL 80** | **PASAL 80** |
| (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.<br>(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.<br>(2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi administratif.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.<br>(2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi administrative.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:** | | |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 80** | **PASAL 80** | **PASAL 80** |
| • Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.<br>• Telah dibentuk PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| **Ayat (1)**<br>Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:<br>a. pembuatan peta penunjukan bersifat arahan tentang batas luar;<br>b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan Lorong-lorong batas;<br>c. pembuatan parit batas pada lokasi rawan; dan<br>d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara digital, antara lain berupa:<br>a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;<br>b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan Lorong-lorong batas;<br>c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan<br>d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Huruf a<br>Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara digital, antara lain berupa:<br>a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;<br>b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan Lorong-lorong batas;<br>c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan<br>d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| | **Ayat (4)**<br>Cukup jelas<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas | **Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas |

Angka 2

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan penutupan hutan (*forest coverage*) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.<br>Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari.<br>**Ayat (2)**<br>Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "penutupan hutan" atau *forest coverage* adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.<br>Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "penutupan hutan" atau *forest coverage* adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.<br>Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DSA) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.<br>Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaiknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya. | | |

Angka 3

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 19** | **PASAL 19** | **PASAL 19** |
| **Ayat (1)**<br>Penelitian terpadu | **Ayat (1)**<br>Penelitian terpadu dilaksanakan | **Ayat (1)**<br>Penelitian terpadu |

| | | |
|---|---|---|
| dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authoritg) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis", adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<br>**Ayat (3)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. kriteria fungsi hutan,<br>b. cakupan luas,<br>c. pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan<br>d. tata cara perubahan. | untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authoritg) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authoritg) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. |

Angka 4

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 26** | **PASAL 26** | **PASAL 26** |
| **Ayat (1)**<br>bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti: | **Ayat (1)**<br>bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:<br>a. budi daya jamur; | **Ayat (1)**<br>bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti: |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| a. budi daya jamur;<br>b. penangkaran satwa; dan<br>c. budi daya tanaman obat dan tanaman hias.<br>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:<br>a. pemanfaatan untuk wisata alam;<br>b. pemanfaatan air; dan<br>c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.<br>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:<br>a. mengambil rotan;<br>b. mengambil madu; dan<br>c. mengambil buah.<br>Usaha pemanfaatan dan pemungutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<br>**Ayat (2)** | b. penangkaran satwa; dan<br>c. budi daya tanaman obat dan tanaman hias.<br>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:<br>a. pemanfaatan untuk wisata alam;<br>b. pemanfaatan air; dan<br>c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.<br>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:<br>a. mengambil rotan;<br>b. mengambil madu; dan<br>c. mengambil buah.<br>Usaha pemanfaatan dan pemungutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | a. budi daya jamur;<br>b. penangkaran satwa; dan<br>c. budi daya tanaman obat dan tanaman hias.<br>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:<br>a. pemanfaatan untuk wisata alam;<br>b. pemanfaatan air; dan<br>c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.<br>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:<br>a. mengambil rotan;<br>b. mengambil madu; dan<br>c. mengambil buah.<br>Usaha pemanfaatan dan pemungutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| Cukup jelas. | | generasi yang akan datang.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. |

Angka 5

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 27** | **PASAL 27** | **PASAL 27** |
| **Ayat (1)**<br>Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksankan oleh perorangan, masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMN, atau BUMS Indonesia.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 6

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| **Ayat (1)**<br>Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksankan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan.<br>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.<br>Pemanfaatan hasil hutan | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman.<br>Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.<br>Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.<br>Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan asset yang dapat dijadikan angunan.<br>Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kaya maupun bukan kayu, dengan Batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan asas lestari dan berkeadilan.<br>Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyadaran, pengagkutan, pengelolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas. | | |

Angka 7

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 29** | **PASAL 29** | **PASAL 29** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 8

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** | **PASAL 29A DAN PASAL 29B** |
| | **Pasal 29A**<br>Cukup jelas.<br><br>**Pasal 29B**<br>Cukup jelas. | **Pasal 29A**<br>Cukup jelas.<br><br>**Pasal 29B**<br>Cukup jelas. |

Angka 9

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja sama tersebut kearsipan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama.<br>Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional.<br>Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, | Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Dalam hal | Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 30** | **PASAL 30** | **PASAL 30** |
| dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, BUMD, BUMS Indonesia.<br>Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, MUMD, dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut. | koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut. | profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut. |

Angka 10

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 31** | **PASAL 31** | **PASAL 31** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "aspek kelestarian hutan" antara lain:<br>a. kelestarian lingkungan;<br>b. kelestarian produksi; dan<br>c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan.<br>Yang dimaksud dengan "aspek kepastian usaha" antara lain:<br>a. kepastian kawasan;<br>b. kepastian waktu usaha; dan<br>c. kepastian jaminan hukum berusah.<br>**Ayat (2)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. pembatasan luas; | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "aspek kelestarian hutan" antara lain:<br>a. kelestarian lingkungan;<br>b. kelestarian produksi; dan<br>c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan.<br>Yang dimaksud dengan "aspek kepastian usaha" antara lain:<br>a. kepastian kawasan;<br>b. kepastian waktu usaha; dan<br>c. kepastian jaminan hukum berusah.<br>**Ayat (2)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. pembatasan luas;<br>b. pembatasan jumlah izin usaha; dan<br>c. penataan lokasi usaha. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "aspek kelestarian hutan" antara lain:<br>a. kelestarian lingkungan;<br>b. kelestarian produksi; dan<br>c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan.<br>Yang dimaksud dengan "aspek kepastian usaha" antara lain:<br>a. kepastian kawasan;<br>b. kepastian waktu usaha; dan<br>c. kepastian jaminan hukum berusah.<br>**Ayat (2)** |

| | | |
|---|---|---|
| b. pembatasan jumlah izin usaha; dan<br>c. penataan lokasi usaha. | | Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. pembatasan luas;<br>b. pembatasan jumlah izin usaha; dan<br>**c.** penataan lokasi usaha |

Angka 11

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 32** | **PASAL 32** | **PASAL 32** |
| khusus bagi pemegang Perizinan Berusaha berskala besar, kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, mencakup juga pengertian untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya. | Khusus bagi pemegang Perizinan Berusaha berskala besar, kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, mencakup juga pengertian untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya. | Khusus bagi pemegang Perizinan Berusaha berskala besar, kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, mencakup juga pengertian untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya. |

Angka 12

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 33** | **PASAL 33** | **PASAL 33** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "pengelolahan hasil hutan" adalah pengelohan halu hasil hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku hasil hutan terhadap permintaan bahan baku industry hulu pengelolaan hasil hutan, maka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industry pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh Menteri. | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "pengelolahan hasil hutan" adalah pengelohan halu hasil hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "pengelolahan hasil hutan" adalah pengelohan halu hasil hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. |

Angka 13

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| **Ayat (1)**<br>Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.<br>Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.<br>Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.<br>Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan Kembali oleh pemegang izin usaha apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 35** | **PASAL 35** | **PASAL 35** |
| ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.<br>**Ayat (2)**<br>Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasional lembaga tersebut dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. tata cara pengenaan;<br>b. tata cara pembayaran;<br>c. tata cara pengelolaan;<br>d. tata cara penggunaan; dan<br>e. tata cara pengawasan dan pengendalian. | | |

Angka 14

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| **Ayat (1)**<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di | **Ayat (1)**<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam | **Ayat (1)**<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat dilaksanakan di |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Pada Prinsipnya kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertmbangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas. | kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. | dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.<br>Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas. |

Angka 15

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pelindungan hutan" | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pelindungan hutan"termasuk | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "pelindungan |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| termasuk di dalamnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hak masyarakat hukum adat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang Perizinan Berusaha meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. prinsip-prinsip pelindungan hutan;<br>b. wewenang kepolisian khusus kehutanan;<br>c. tata usaha peredaran hasil hutan; dan<br>d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah. | di dalamnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hak masyarakat hukum adat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang Perizinan Berusaha meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. prinsip-prinsip pelindungan hutan;<br>b. wewenang kepolisian khusus kehutanan;<br>c. tata usaha peredaran hasil hutan; dan<br>d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah. | hutan"termasuk di dalamnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hak masyarakat hukum adat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang Perizinan Berusaha meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:<br>a. prinsip-prinsip pelindungan hutan;<br>b. wewenang kepolisian khusus kehutanan;<br>**c.** tata usaha peredaran hasil hutan; dan |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 48** | **PASAL 48** | **PASAL 48** |
| | | **d.** pemberian kewenangan operasional kepada daerah |

Angka 16

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 49** | **PASAL 49** | **PASAL 49** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 17

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum oran pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.<br>Prasarana perlindungan hutan misalnya paga-pagar pembatas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.<br>Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<br>**Ayat (3)**<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengelola | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.<br>Yang dimaksud dengan "kerusakan hutan" adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.<br>Yang dimaksud dengan "kerusakan hutan" adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<br>**Ayat (2)**<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Cukup jelas.<br>Huruf e<br>Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat pemerintah yang |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.<br>Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.<br>Yang dimaksud sengan kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.<br>Huruf c<br>Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingn konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapt diberikan oleh Menteri, sengan memperhatikan kepentingan masyarakat. | pemberian Perizinan Berusaha.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberian Perizinan Berusaha.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| Huruf d<br>Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.<br>Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat diletakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.<br>Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.<br>Huruf e<br>Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.<br>Huruf f<br>Cukup jelas.<br>Huruf g<br>a. yang dumaksud dengan penyelidikan umum adalah penyeldikan secara geologi umum atau membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tand adanya bahan galian.<br>b. Yang dimaksud dengan ekplorasi adalah segal penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebeih teliti dan lebih seksama | | |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 50 | PASAL 50 | PASAL 50 |
| adanya bahan galian dan sifat letaknya.<br>c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkn bahan galian dan memanfaatkannya.<br>Huruf h<br>Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.<br>Apabila diantara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sh sebagai berikut.<br>Huruf i<br>Pejabat yng berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untu kegiatan penggembalaan ternak dan kawasan hutan.<br>Huruf j<br>Yang dimaksud dengan alat-alat berat unutk mengangkut, antara lain berupa traktor, buldozer, truck, longing truck, trailer, crane, tongkang, perahu, klotok, helicopter, jep, tugboat, dan kapal. | | |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 50** | **PASAL 50** | **PASAL 50** |
| Huruf k<br>Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok atau yang sejenis lainnya, seuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.<br>Huruf l<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (4)**<br>Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. | | |

Angka 18

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | **PASAL 50A** | **PASAL 50A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 19

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Setiap pidana penjar dan | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan pidana tambahan.<br>**Ayat (4)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (5)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (6)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (7)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (8)**<br>Ketentuan pidana yang dikenakan ayat ini merupakan pelanggaran terhadap kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh rakyat. Oleh karena itu sanksi pidana yang diberikan relative ringan dan diarahkan untuk pembinaan.<br>**Ayat (9)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (10)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (11)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (12)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (13)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (14)**<br>Yang termasuk badan hukum usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer venootschapp*), firma, koperasi, dan sejenisnya.<br>**Ayat (15)**<br>Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, | | |

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 78** | **PASAL 78** | **PASAL 78** |
| truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain-lain. | | |

Angka 20

| UU KEHUTANAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 80** | **PASAL 80** | **PASAL 80** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.<br>**Ayat (3)**<br>Pengaturan Pemerintah memuat atauran antara lain:<br>a. ketetuan-ketentuan ganti rugi dan sanksi admnistratif.<br>b. bentuk-bentuk sanksi; dan<br>c. pengawasan pelaksanaan. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## K. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

### Pasal 37

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, 5, 23, dan 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| (1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. | (1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. | (1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. |
| (2) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. | (2) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. | (2) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. |
| (3) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan | (3) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Pertzinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan | (3) Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak Hutan melalui kegiatan Pembalakan Liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. | pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat. | bertentangan dengan maksud dan tuj uan pember ian P erizinan B eru saha di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat. |
| (4) Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. | (4) Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. | (4) Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu secara tidak sah yang Terorganisasi. |
| (5) Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. | (5) Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | (5) Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan Terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |
| (6) Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang | (6) Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan | (6) Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan Perusakan Hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan yang |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. | tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. | melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. |
| (7) Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. | (7) Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. | (7) Pencegahan Perusakan Hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya Perusakan Hutan. |
| (8) Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. | (8) Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. | (8) Pencegahan Perusakan Hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya Perusakan Hutan. |
| (9) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. | (9) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan ka5ru, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. | (9) Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, serta memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. |
| (10) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil | (10) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan | (10) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 4dalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 1 | PASAL 1 | PASAL 1 |
| hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya | berupa ka).u melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. | berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. |
| (10) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. | (11) Perrzinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaarr) dan pemasaran. | (11) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada Hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. |
| (12) Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. | (12) Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. | (12) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada Hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. |
| (13) Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu | (13) Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan | (13) Hasil Hutan Kayu adalah hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 1 | PASAL 1 | PASAL 1 |
| pacakan yang berasal dari kawasan hutan. | yang berasal dari kawasan hutan. | yang berasal dari Kawasan Hutan. |
| (14) Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. | (14) Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. | (14) Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. |
| (14) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. | (15) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. | (15) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan Hutan yang oleh kuasa UndangUndang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. |
| (16) Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. | (16) Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. | (16) Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| (17) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. | (17) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. | (17) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya |
| (18) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. | (18) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. | (18) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. |
| (19) Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. | (19) Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. | (19) Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanva dugaan, sedang, atau telah terjadinya Perusakan Hutan kepada Pejabat yang berwenang. |
| (20) Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. | (20) Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. | (20) Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya Perusakan Hutan kepada Pejabat yang berwenang. |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| (21) Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. | (21) Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. | (21) Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perrrsakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. |
| (22) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. | (22) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. | (22) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. |
| (23) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | (23) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | (23) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| (24) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | (24) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | (24) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
| (25) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan | (25) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan | (25) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| urusan pemerintahan di bidang kehutanan. | urusan pemerintahan di bidang kehutanan. | urusan pemerintahan di bidang kehutanan. |

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. | Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan. | Pencegahan Perusakan Hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau Korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan. |

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 12** | **PASAL 12** | **PASAL 12** |
| Setiap orang dilarang:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;<br>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;<br>c. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;<br>d. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara | Setiap orang dilarang:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan;<br>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;<br>d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi | Setiap orang dilarang:<br>a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;<br>b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;<br>d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 12 | PASAL 12 | PASAL 12 |
| bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;<br>e. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;<br>f. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;<br>g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;<br>h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;<br>i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;<br>j. membeli, memasarkan, | secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;<br>f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;<br>i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;<br>j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;<br>k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;<br>l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil | Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;<br>f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim, atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar;<br>i. mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara;<br>j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil Hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar;<br>k. membeli, memasarkan, dan latau mengolah Hasil Hutan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 12 | PASAL 12 | PASAL 12 |
| dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. | atau dipungut secara tidak sah; dan/atau<br>m. menerima menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, danf atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. | Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau<br>l. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. |

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | PASAL 12A | PASAL 12A |
| - | (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. | (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f danlatau huruf h dikenai sanksi administratif. |
| | (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam danf atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan | (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | PASAL 12A | PASAL 12A |
| | terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. | tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. |

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 17 | PASAL 17 | PASAL 17 |
| (1) Setiap orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;<br>b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;<br>d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan | (1) Setiap orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan | (1) Setiap Orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau<br>e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. | penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/ atau<br>e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau<br>e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |
| (2) Setiap orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;<br>b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;<br>d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan | (2) Setiap orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>d. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau | (2) Setiap Orang dilarang:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;<br>c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau<br>e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin | menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau<br>e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusa! dan/atau<br>e. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau |

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 17A** | **PASAL 17A** |
| - | (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif.<br>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal | (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (21 huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif.<br>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:<br>a. orang perseorangan atau kelompok |

| | | |
|---|---|---|
| | di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. | masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau<br>b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. |

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. paksaan pemerintah;<br>b. uang paksa; dan/atau<br>c. pencabutan izin | (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. paksaan pemerintah;<br>c. denda administratif;<br>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha. | (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau Korporasi dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. paksaan pemerintah;<br>c. paksaan pemerintah;<br>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau<br>e. pencabutanPerizinan Berusaha. |
| (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, |

| UU P3H | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan | | |

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 24** | **PASAL 24** | **PASAL 24** |
| Setiap orang dilarang:<br>a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;<br>b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri. | Setiap pejabat dilarang:<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. | Setiap Orang dilarang<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan kecuali dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. |

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Setiap pejabat dilarang:<br>a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau | Setiap pejabat dilarang:<br>a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan | Setiap Orang dilarang<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan |

| | | |
|---|---|---|
| penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;<br>b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;<br>g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau<br>h. lalai dalam melaksanakan tugas | kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;<br>b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan danf atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;<br>f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;<br>a. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dengan sengaja; dan/atau<br>b. lalai dalam melaksanakan tugas. | Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan;<br>b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;<br>c. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan Pembalakan Liar danlatau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;<br>f. menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa hak;<br>g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dengan sengaja; dan/atau<br>h. lalai dalam melaksanakan tugas. |

10. Pasal 53 dihapus.

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 53** | **PASAL 53** | **PASAL 53** |
| (1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc. | Dihapus | Dihapus |
| (2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. | | |
| (3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan. | | |
| (4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat. | | |

| | | |
|---|---|---|
| (5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut:<br>a. warga negara Indonesia;<br>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;<br>c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;<br>d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;<br>e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;<br>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;<br>g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik; | | |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 53** | **PASAL 53** | **PASAL 53** |
| h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc. | | |

11. Pasal 54 dihapus.

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| 1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. | Dihapus | Dihapus |
| 2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. | | |
| 3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. unsur Kementerian Kehutanan;<br>b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;<br>c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan<br>d. unsur lain yang terkait. | | |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 54 | PASAL 54 | PASAL 54 |
| 4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | | |

12. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 82 | PASAL 82 | PASAL 82 |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;<br>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;<br>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;<br>b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufb; dan/atau<br>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 82** | **PASAL 82** | **PASAL 82** |
| (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). | paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.0OO.000,O0 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.50O.OOO.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) | Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | (2) Dalam ha1 tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |
| (3) Korporasi yang:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; | (3) Korporasi yang:<br>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; | (3) Korporasi yang:<br>a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 82** | **PASAL 82** | **PASAL 82** |
| b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau<br>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. | b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau<br>c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.O00.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

13. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). | penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). | memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.OO0.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 83 | PASAL 83 | PASAL 83 |
| mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10. 000.O00,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |
| (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan | (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang | (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21huruf c dilakukan oleh orang perseorangan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus-menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| (4) Korporasi yang:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling | (4) Korporasi yang:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau<br>c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. | (4) Korporasi yang:<br>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>b. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;<br>c. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | (5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda. | 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

14. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 84** | **PASAL 84** | **PASAL 84** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.00O,00 (lima miliar rupiah). | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |
| (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 84** | **PASAL 84** | **PASAL 84** |
| menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.O00.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 84** | **PASAL 84** | **PASAL 84** |
| (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | (3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. | (3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi:<br>a. pengurlrsnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.O00.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 84** | **PASAL 84** | **PASAL 84** |
| (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | | |

15. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berr.rsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.0OO.0O0,00 (sepuluh miliar rupiah). |
| (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi:<br>a. Pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. | (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.000.0O0.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau<br>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau<br>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.00O,00 (lima miliar rupiah). | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan/atau<br>b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.00O.000.000,00 (lima miliar rupiah). |
| (2) Korporasi yang: | (2) Korporasi yang: | (2) Korporasi yang: |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau<br>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau<br>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;<br>dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling larna 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. | a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berrrsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan/atau<br>b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b,<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan palinglama20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pokoknya |

17. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan latat mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal LT ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |
| (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e. | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan f atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, | (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berrrsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 huruf e |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.00O.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |
| (3) Korporasi yang:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa | (3) Korporasi yang:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasit perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjuai, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud | (3) Korporasi yang:<br>a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;<br>b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau<br>c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,<br>dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danf atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. | sebagaimana dimaksud dalam Pasal t7 ayat (2) huruf e,<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

18. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan | (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:<br>a. memalsukan Perizinan Berrrsaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 96 | PASAL 96 | PASAL 96 |
| dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). | hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, | Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| (2) Korporasi yang:<br>a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh | (2) Korporasi yang:<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 1nuruf b; dan/atau<br>c. memindahtangankan atau menjual Perrzinan | (2) Korporasi yang:<br>a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;<br>b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,<br>dipidana bagi:<br>1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<br>2. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. | c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,<br>dipidana bagi:<br>a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.0O0.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau<br>b. Korporasi dikenai pemberatan I 13 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan. |

19. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| Setiap pejabat yang:<br>a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;<br>b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin | Setiap pejabat yang:<br>a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;<br>b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan | Setiap Pejabat yang:<br>a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;<br>b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;<br>c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;<br>f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau<br>g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau | Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;<br>c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar danf atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;<br>f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau<br>g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan | Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;<br>c. melindungi pelaku Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;<br>d. ikut serta atau membantu kegiatan Pembalakan Liar danlatau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;<br>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;<br>f. menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau<br>g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga tedadi tindak |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | pidana Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g,<br>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,0O (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |

20. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 110A** | **PASAL 110A** |
| | (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.<br>(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud | (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyele saikan persyaratan palin g lambat tanggal 2 November 2023.<br>(2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahayang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berrrsaha di dalam |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. pembayaran denda administratif; dan/atau<br>b. pencabutanPerizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutuan. | | |

21. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 110B** | **PASAL 110B** |
| - | (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: | (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, hurrrf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | a. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>b. pembayaran denda administatif; dan/atau<br>c. paksaan pemerintah.<br>(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | sanksi administratif, berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan usaha;<br>b. pembayaran denda administratif; dan/atau<br>c. paksaan pemerintah.<br>(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dalam Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutuan. | | |

22. Pasal 111 Dihapus.

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 111** | **PASAL 111** | **PASAL 111** |
| (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. | Dihapus | Dihapus |
| (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. | | |

23. Pasal 112 dihapus.

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 112** | **PASAL 112** | **PASAL 112** |
| Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:<br>a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan<br>b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam | Dihapus | Dihapus |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | | |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas | Cukup jelas |

Angka 2

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. | Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan | Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyaralat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukuin adat. Badan hukum adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 7** | **PASAL 7** | **PASAL 7** |
| Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. | usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. | daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. |

Angka 3

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 12** | **PASAL 12** | **PASAL 12** |
| Huruf a<br>Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "Perrzinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan" adalah perizinan untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan ka5ru, pemanfaatan hasil hutan bukan ka5ru, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu | Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan" adalah Perizinan Berusaha untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan Hasil Hutan kayu, pemanfaatan Hasil Hutan bukan kayu, pemungutan Hasil Hutan kayu, dan/atau pemungutan Hasil Hutan bukan kayu |
| Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "memuat" adalah | Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat | Huruf b<br>Yang dimaksud dengan upenebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Peizinan Berusaha" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah.<br>Huruf c<br>Cukup jelas<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| memasukkan ke dalam alat angkut.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf I<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas. | angkut.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf I<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas | angkut.<br>Huruf e<br>Cukup jelas.<br>Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti par€rng, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.<br>Huruf g<br>Cukup jelas.<br>Huruf h<br>Cukup jelas.<br>Huruf i<br>Cukup jelas.<br>Huruf j<br>Cukup jelas.<br>Huruf k<br>Cukup jelas.<br>Huruf I<br>Cukup jelas.<br>Huruf m<br>Cukup jelas |

Angka 4

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 12A** | **PASAL 12A** |
| | Cukup jelas | Cukup jelas |

Angka 5

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 17** | **PASAL 17** | **PASAL 17** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas | Cukup jelas |

Angka 6

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 17A** | **PASAL 17A** |
| | Cukup jelas | Cukup jelas |

Angka 7

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 18** | **PASAL 18** | **PASAL 18** |
| **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "sanksi administratif" adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara yang berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Terhadap pemegang izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin. | Cukup Jelas | Cukup Jelas |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "paksaan pemerintah" adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. | | |
| Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "uang paksa" adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. | | |
| Huruf c<br>Cukup jelas. | | |
| **Ayat (2)**<br>Cukup Jelas. | | |

Angka 8

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 24** | **PASAL 24** | **PASAL 24** |
| Huruf a<br>Cukup Jelas<br>Huruf b<br>Cukup Jelas<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual Perizinan Berusaha" adalah terbatas pada pengalihan Perizinan | Huruf a<br>Cukup Jelas<br>Huruf b<br>Cukup Jelas<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual Perizinan Berusaha" adalah terbatas pada pengalihan Perizinan Berusaha | Huruf a<br>Cukup Jelas<br>Huruf b<br>Cukup Jelas<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual Perizinan Berusaha" adalah terbatas pada pengalihan Perizinan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| Berusaha terkait pemanfaatan dari pemegang Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk akuisisi. | terkait pemanfaatan dari pemegang Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk akuisisi. | Berusaha terkait pemanfaatan dari pemegang Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk akuisisi. |

Angka 9

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Huruf a<br>Cukup Jelas.<br>Huruf b<br>Cukup Jelas.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.<br>Huruf e<br>Cukup Jelas.<br>Huruf f<br>Cukup Jelas.<br>Huruf g | Huruf a<br>Cukup Jelas.<br>Huruf b<br>Cukup Jelas.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.<br>Huruf e<br>Cukup Jelas.<br>Huruf f<br>Cukup Jelas.<br>Huruf g<br>Cukup Jelas.<br>Huruf h<br>Cukup Jelas. | Huruf a<br>Cukup Jelas.<br>Huruf b<br>Cukup Jelas.<br>Huruf c<br>Huruf a<br>Cukup Jelas.<br>Huruf b<br>Cukup Jelas.<br>Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.<br>Huruf d<br>Yang dimaKsud dengan "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 28** | **PASAL 28** | **PASAL 28** |
| Cukup Jelas.<br>Huruf h<br>Cukup Jelas. | | liar.<br>Huruf e<br>Cukup Jelas.<br>Huruf f<br>Cukup Jelas.<br>Huruf g<br>Cukup Jelas.<br>Huruf h<br>Cukup Jelas. |

Angka 10

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 53** | **PASAL 53** | **PASAL 53** |
| Cukup Jelas | Dihapus | Dihapus |

Angka 11

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 54** | **PASAL 54** | **PASAL 54** |
| Ayat (1)<br>Cukup Jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup Jelas<br>Ayat (3)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "unsur lain yang terkait" adalah antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Dihapus | Dihapus |

Angka 12

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 82** | **PASAL 82** | **PASAL 82** |
| **Ayat (1)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas. | **Ayat (1)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas. | **Ayat (1)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (2)**<br>Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan' adalah orang perseorzrngan yang bermukim di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas. |

Angka 13

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 83** | **PASAL 83** | **PASAL 83** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 14

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 84** | **PASAL 84** | **PASAL 84** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 15

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 85** | **PASAL 85** | **PASAL 85** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 16

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 92** | **PASAL 92** | **PASAL 92** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 17

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 93** | **PASAL 93** | **PASAL 93** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 18

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 96** | **PASAL 96** | **PASAL 96** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 19

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 105** | **PASAL 105** | **PASAL 105** |
| Cukup Jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 20

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 110A** | **PASAL 110A** |
| | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki tzin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini berlaku.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki tzin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini berlaku.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas. |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 110B** | **PASAL 110B** |
| | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini berlaku.<br>Huruf a<br>Cukup Jelas. | **Ayat (1)**<br>Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini berlaku.<br>Huruf a |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | Huruf b<br>Contoh penghitungan pembayaran denda administratif pada usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan, antara lain dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:<br>a. Luas kawasan hutan yang dikuasai dan digunakan untuk kegiatan perkebunan.<br>b. Jangka waktu penguasaan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, dengan perhitungan jangka waktu pada saat usia tanaman produktif secara ekonomi pertama kali sampai dengan waktu saat terakhir penguasaannya.<br>c. Persentase tarif denda dari nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh persatuan luas kegiatan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya<br>Rumus perhitungan denda pada kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut: Denda sama dengan luas perkebunan kelapa sawit dikalikan dengan jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (tahun) dikalikan dengan tarif denda dari persentase keuntungan pertahun (Rupiah).<br>D = L x J x TD<br>Keterangan:<br>L = Luas Perkebunan Kelapa | Cukup Jelas.<br>Huruf b<br>Contoh penghitungan pembayaran denda administratif pada usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan, antara lain dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:<br>a. Luas kawasan hutan yang dikuasai dan digunakan untuk kegiatan perkebunan.<br>b. Jangka waktu penguasaan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, dengan perhitungan jangka waktu pada saat usia tanaman produktif secara ekonomi pertama kali sampai dengan waktu saat terakhir penguasaannya.<br>c. Persentase tarif denda dari nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh persatuan luas kegiatan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya<br>Rumus perhitungan denda pada kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut: Denda sama dengan luas perkebunan kelapa sawit dikalikan dengan jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (tahun) dikalikan dengan tarif denda dari persentase keuntungan pertahun (Rupiah). |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | Sawit dalam kawasan hutan (Hektar) J = Jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (Tahun)<br>TD = Tarif Denda dari persentase keuntungan per tahun (Rupiah).<br>Contoh Asumsi Perhitungan Denda (D) yang digunakan adalah:<br>a. (L) Luas Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di dalam kawasan hutan (dalam satuan Hektar).<br>Contoh luas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan adalah 10.000 (sepuluh ribu) Hektar;<br>b. (J) Jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (dalam satuan tahun). Perhitungan waktu dimulai saat usia produktif secara ekonomi sampai dengan terakhir penguasaannya.<br>Perkebunan kelapa sawit akan mulai usia produktif (UP) pada usia tanaman mencapai umur 5 tahun. Sehingga apabila ada kelapa sawit usia tanaman (UT) 15 tahun pada tahun 2020, maka diasumsikan jangka waktu kegiatan perkebunan dihitung sebagai berikut:<br>Jangka Waktu (J) = Usia Tanaman (UT) - Usia Tanaman Produktif (UP)<br>J = 15 Tahun – 5 Tahun<br>J = 10 Tahun;<br>c. (TD) Persentase tarif denda nilai keuntungan | D = L x J x TD<br>Keterangan:<br>L = Luas Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan (Hektar) J = Jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (Tahun)<br>TD = Tarif Denda dari persentase keuntungan per tahun (Rupiah).<br>Contoh Asumsi Perhitungan Denda (D) yang digunakan adalah:<br>a. ((L) Luas Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di dalam kawasan hutan (dalam satuan Hektar).<br>Contoh luas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan adalah 10.000 (sepuluh ribu) Hektar;<br>b. (J) Jangka waktu kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan (dalam satuan tahun). Perhitungan waktu dimulai saat usia produktif secara ekonomi sampai dengan terakhir penguasaannya.<br>Perkebunan kelapa sawit akan mulai usia produktif (UP) pada usia tanaman mencapai umur 5 tahun. Sehingga apabila ada kelapa sawit usia tanaman (UT) 15 tahun pada tahun 2020, maka diasumsikan jangka waktu kegiatan perkebunan dihitung sebagai berikut:<br>Jangka Waktu (J) = Usia |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | ekonomi yang diperoleh persatuan luas per tahun (dalam satuan Rupiah), yaitu tarif denda persentase dari total nilai total keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit selama 1 (satu) tahun. Contoh Perhitungannya adalah asumsi rata rata pendapatan bersih (PB) per tahun adalah Rp25.000.000,00.<br>Persentase Tarif Denda Nilai Keuntungan (DK) antara 20% - 60% dari total pendapatan bersih.<br>TD = Pendapatan Bersih Per Tahun (PB) x % Tarif Denda Nilai Keuntungan (DK)<br>TD = Rp25.000.000,00 X 20% (Jika tarif 2O%) = Rp5.000.000,00<br>d. Sehingga Perhitungan Total Denda pada Sawit dengan luas Tanaman 10.000 (sepuluh ribu) Hektar, Jangka waktu penguasaan perkebunan 10 (sepuluh) tahun dan Tarif Denda 20% (dua puluh persen) (Rp5.000.000, -) adalah:<br>D = L x J x TD<br>D = 10.000 He x 10 tahun x Rp5.000.000,00<br>D = Rp500.000.000.000,00<br>Huruf c<br>Untuk memberikan efek eksekutorial sanksi administratif pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perlu diatur sanksi paksaan oleh | Tanaman (UT) - Usia Tanaman Produktif (UP)<br>J = 15 Tahun – 5 Tahun<br>J = 10 Tahun;<br>c. (TD) Persentase tarif denda nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh persatuan luas per tahun (dalam satuan Rupiah), yaitu tarif denda persentase dari total nilai total keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit selama 1 (satu) tahun. Contoh Perhitungannya adalah asumsi rata rata pendapatan bersih (PB) per tahun adalah Rp25.000.000,00.<br>Persentase Tarif Denda Nilai Keuntungan (DK) antara 20% - 60% dari total pendapatan bersih.<br>TD = Pendapatan Bersih Per Tahun (PB) x % Tarif Denda Nilai Keuntungan (DK)<br>TD = Rp25.000.000,00 X 20% (Jika tarif 2O%) = Rp5.000.000,00<br>d. Sehingga Perhitungan Total Denda pada Sawit dengan luas Tanaman 10.000 (sepuluh ribu) Hektar, Jangka waktu penguasaan perkebunan 10 (sepuluh) tahun dan Tarif Denda 20% (dua puluh persen) (Rp5.000.000, -) adalah:<br>D = L x J x TD<br>D = 10.000 He x 10 tahun x |

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| | Pemerintah Fusat termasuk pemberlakuan paksa badan (gizelling) bagi orang yang tidak melaksanakan sanksi administratif.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas | Rp5.000.000,00<br>D = Rp500.000.000.000,00<br>Huruf c<br>Untuk memberikan efek eksekutorial sanksi administratif pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perlu diatur sanksi paksaan oleh Pemerintah Fusat termasuk pemberlakuan paksa badan (gizelling) bagi orang yang tidak melaksanakan sanksi administratif.<br>**Ayat (2)**<br>Cukup Jelas.<br>**Ayat (3)**<br>Cukup Jelas |

Angka 21

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **Pasal 111** | **Pasal 111** | **Pasal 111** |
| Cukup Jelas | Dihapus | Dihapus |

Angka 22

| UU P3H | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 11/2020 |
|---|---|---|
| **Pasal 112** | **Pasal 112** | **Pasal 112** |
| Cukup Jelas | Dihapus | Dihapus |

## L. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

### Pasal 64

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| (7) Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. | (7) Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan. | (7) Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan. |

**2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.<br>(2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan. | (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:<br>a. Produksi Pangan dalam negeri;<br>b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau<br>c. Impor.<br>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tarif. | (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:<br>a. Produksi Pangan dalam negeri;<br>b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau<br>c. Impor.<br>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tarif. |

**3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan.<br>(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain. | (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.<br>(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain. | (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.<br>(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain. |

**4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36** | **PASAL 36** | **PASAL 36** |
| (1) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.<br>(2) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. | (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<br>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.<br>(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. | (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<br>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.<br>(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. |

**5. Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 39** | **PASAL 39** | **PASAL 39** |
| Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. | Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. | Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. |

**6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaran Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.<br>(2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.<br>(3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br>(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.<br>(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.<br>(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.<br>(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br>(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.<br>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi | (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.<br>(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.<br>(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br>(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.<br>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| | pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).<br>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan termasuk pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** | membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan termasuk pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Belum dibentuk peraturan pelaksana amanat UU 11/2020.<br>● PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengatur mengenai keamanan pangan namun dalam konsideran mengingat dan menimbangnya tidak disebutkan UU Pangan sebagai salah satu poinnya.<br>● Pelaksanaan keamanan pangan mengacu pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. | | |

**7. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 72** | **PASAL 72** | **PASAL 72** |
| (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi; dan/atau<br>e. pencabutan izin. | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 72** | **PASAL 72** | **PASAL 72** |
| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif **diatur dalam Peraturan Pemerintah.** | c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Belum dibentuk peraturan pelaksana amanat UU 6/2023.<br>● Pelaksanaan keamanan pangan mengacu pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. | | |

**8. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| (1) Pemerintah berkewajian memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.<br>(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. | (1) Pemerintah Pusat wajib memerikasa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.<br>(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat | (1) Pemerintah Pusat wajib memerikasa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.<br>(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat |

**9. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 77** | **PASAL 77** | **PASAL 77** |
| (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetika Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.<br>(3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah<br>(4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetika Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetika Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

**10. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 81** | **PASAL 81** | **PASAL 81** |
| (1) Iridiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.<br>(2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (1) Iridiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan Perzininan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | (1) Iridiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan Perzininan Berusaha dari Pemerintah Pusat. |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 81** | **PASAL 81** | **PASAL 81** |
| diberikan setelah memenuhi:<br>a. persyaratan kesehatan;<br>b. prinsip pengolahan;<br>c. dosis;<br>d. teknik dan peralatan;<br>e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;<br>f. keselamatan kerja; dan<br>g. kelestarian lingkungan.<br>(3) Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Belum dibentuk peraturan pelaksana amanat UU 6/2023.<br>● Pelaksanaan keamanan pangan mengacu pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. | | |

**11. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 87** | **PASAL 87** | **PASAL 87** |
| (1) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.<br>(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Dihapus. | Dihapus. |

**12. Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu | (1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pngan Segar. | (1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pngan Segar. |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| Pangan Segar.<br>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan<br>(3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah | (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha. | (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha. |

**13. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 89A** | **PASAL 89A** |
| - | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (2), atau Pasal 89 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari | (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (2), atau Pasal 89 dikenai sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br>a. denda;<br>b. penghentian sementara dari |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 89A** | **PASAL 89A** |
| | kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. penarikan Pangan dan peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi;dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam **Peraturan Pemerintah** | kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;<br>c. penarikan Pangan dan peredaran oleh produsen;<br>d. ganti rugi;dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam **Peraturan Pemerintah** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | |

**14. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 91** | **PASAL 91** | **PASAL 91** |
| (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.<br>(2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.<br>(3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pmerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<br>(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud | (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pmerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 91** | **PASAL 91** | **PASAL 91** |
| | pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | |

**15. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 133** | **PASAL 133** | **PASAL 133** |
| Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). | Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). | Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). |

**16. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 134** | **PASAL 134** | **PASAL 134** |
| Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). | (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiki rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dalam Pasal 72. | (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiki rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dalam Pasal 72. |

**17. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 135** | **PASAL 135** | **PASAL 135** |
| Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). | (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana pada dimaksud ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. | (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana pada dimaksud ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. |

**18. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 139** | **PASAL 139** | **PASAL 139** |
| Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. | (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. |

**19. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 140** | **PASAL 140** | **PASAL 140** |
| Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan | (1) Setiap Orang yang memproduksi dan | (1) Setiap Orang yang memproduksi dan |

| | | |
|---|---|---|
| yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). | memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A | memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A |

**20. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 141** | **PASAL 141** | **PASAL 141** |
| Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan | (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label | (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 141** | **PASAL 141** | **PASAL 141** |
| pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). | Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A ayat (2). | label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A ayat (2). |

**21. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 142** | **PASAL 142** | **PASAL 142** |
| Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling | (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran | (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 142** | **PASAL 142** | **PASAL 142** |
| lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau menengah.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A ayat (2). | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha danlatau kegiatan berisiko rendah atau menengah.<br>(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A ayat (2). |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 14** | **PASAL 14** | **PASAL 14** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 3

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 15** | **PASAL 15** | **PASAL 15** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. |

Angka 4

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 36** | **PASAL 36** | **PASAL 36** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 5

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 39** | **PASAL 39** | **PASAL 39** |
| Cukup Jelas | Usaha tani meliputi peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. | Usaha tani meliputi peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. |

Angka 6

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "rantai Pangan" adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "rantai Pangan" adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "rantai Pangan" adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, |

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 68** | **PASAL 68** | **PASAL 68** |
| penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.<br>Yang dimaksud dengan "secara terpadu" adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.<br>Ayat (2)<br>Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.<br>Yang dimaksud dengan "secara terpadu" adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.<br>Ayat (2)<br>Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.<br>Yang dimaksud dengan "secara terpadu" adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.<br>Ayat (2)<br>Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. |

Angka 7

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 72 | PASAL 72 | PASAL 72 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 8

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 74 | PASAL 74 | PASAL 74 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 9

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 77 | PASAL 77 | PASAL 77 |
| Ayat (1)<br>Cukup Jelas<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.<br>Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan Pangan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam Perizinan Berusaha adalah dari aspek Keamanan Pangan.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.<br>Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan Pangan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam Perizinan Berusaha adalah dari aspek Keamanan Pangan.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.<br>Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan Pangan.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 10

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 81 | PASAL 81 | PASAL 81 |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 11

| UU Pangan | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 87** | **PASAL 87** | **PASAL 87** |
| Cukup Jelas | Dihapus | Dihapus |

Angka 12

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 88** | **PASAL 88** | **PASAL 88** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 13

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 89A** | **PASAL 89A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 14

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 91** | **PASAL 91** | **PASAL 91** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan"Pangan Olahan tertentu" adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan"Pangan Olahan tertentu" adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan"Pangan Olahan tertentu" adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Angka 15

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 133** | **PASAL 133** | **PASAL 133** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 16

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 134** | **PASAL 134** | **PASAL 134** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 17

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 135** | **PASAL 135** | **PASAL 135** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 18

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 139** | **PASAL 139** | **PASAL 139** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 19

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 140** | **PASAL 140** | **PASAL 140** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 20

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 141** | **PASAL 141** | **PASAL 141** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 21

| UU PANGAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 142** | **PASAL 142** | **PASAL 142** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## M. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYAAN IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

### Pasal 115

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah sebagai berikut

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| (4) Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). | (4) Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. | 1 Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.<br>2 Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.<br>3 Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| | | 4 Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.<br>5 Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.<br>6 Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.<br>7 Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.<br>8 Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| PASAL 1 | PASAL 1 | PASAL 1 |
| | | kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<br>9 Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.<br>10 Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<br>11 Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.<br>12 Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.<br>13 Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| | | menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<br>14 Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan U saha Pergaraman.<br>15 Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.<br>16 Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.<br>17 Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.<br>18 Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.<br>19 Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| | | 20 Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.<br>21 Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.<br>22 Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.<br>23 Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.<br>24 Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.<br>25 Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| | | diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.<br>26 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<br>27 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.<br>28 Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.<br>29 Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.<br>30 Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| | | perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.<br>31 Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.<br>32 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Repu blik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br>33 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>34 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan. |

2. **Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.<br>(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.<br>(3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. | (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko | | |

3. **Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, | (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu | (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri. | pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman se bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko | | |

4. **Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 38A** | **PASAL 38A** |
| - | (1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:<br>a. penghentian sementara kegiatan; | (1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa: |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| - | **PASAL 38A** | **PASAL 38A** |
| | b. pembekuan Perizinan Berusaha;<br>c. denda administratif;<br>d. paksaan pemerintah; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** | a. penghentian sementara kegiatan;<br>b. pembekuan Perizinan Berusaha;<br>c. denda administratif;<br>d. paksaan Pemerintah Pusat; dan/atau<br>e. pencabutan Perizinan Berusaha.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.** |
| **Catatan:**<br>● Telah dibentuk PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.<br>● Telah dibentuk PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. | | |

5. **Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud | Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana | Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah |

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). | dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). | Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 1** | **PASAL 1** | **PASAL 1** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 2

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 37** | **PASAL 37** | **PASAL 37** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 3

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 38** | **PASAL 38** | **PASAL 38** |
| Yang dimaksud dengan "standar mutu wajib" adalah standar nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "standar mutu wajib" adalah standar nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "standar mutu wajib" adalah standar nasional Indonesia (SNI)/standar mutu yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas Perikanan atau SNI yang diberlakukan secara wajin pada Komoditas Pergaraman.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |

Angka 4

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **-** | **PASAL 38A** | **PASAL 38A** |
| - | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Angka 5

| UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 74** | **PASAL 74** | **PASAL 74** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

## N. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

### Pasal 124

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[8] |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: | (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.<br>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |

[8] Undang-Undang ini diubah melalui Pasal 124 Lampiran UU 6/2023. Pasal ini tidak berubah penempatannya dari pengaturan dalam UU 11/2020.
Tidak terdapat Perbedaan ketentuan dalam lampiran UU 6/2023 dengan UU 11/2023.

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[8] |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| a. dilakukan kajian kelayakan strategis;<br>b. disusun rencana alih fungsi lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan<br>d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.<br>(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.<br>(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.<br>(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:<br>a. dilakukan kajian kelayakan strategis;<br>b. disusun rencana alih fungsi lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan<br>d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.<br>(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.<br>(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. | untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:<br>a. dilakukan kajian kelayakan strategis;<br>b. disusun rencana alih fungsi lahan;<br>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan<br>d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.<br>(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.<br>(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. |

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023[8] |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| | (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

**2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berkut:**

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 73** | **PASAL 73** | **PASAL 73** |
| Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Angka 1

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 44** | **PASAL 44** | **PASAL 44** |
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas. |

Angka 2

| UU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | UU 11/2020 | LAMPIRAN UU 6/2023 |
|---|---|---|
| **PASAL 73** | **PASAL 73** | **PASAL 73** |
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |